

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ORANG TUA  
TERHADAP ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN  
(Studi Kasus Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten  
Bone Tahun 2018)**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan

Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

**OLEH :**

**MUHAMMAD ISMAIL**

**NIM: 10100114143**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2019**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ismail  
NIM : 10100114143  
Tempat/Tgl. Lahir : kung, 12 juli 1996  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Peradilan/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan  
Fakultas/Program : Syari'ah dan Hukum/S1  
Alamat : perumahan tamangapa royal place blok d6  
Judul : “Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian ( Studi Kasus Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone Tahun 2018 )”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 03 JANUARI 2019.

Penyusun,

MUHAMMAD ISMAIL

NIM: 10100114143

#### PENGESAHAN SKRIPSI

Skrpsi yang berjudul, "TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Kasus Desa Waji Kecamatan Telluistange Kabupaten Bone Tahun 2018)", yang disusun oleh Muhammad Ismail, NIM: 10100114143, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 04 Maret 2019 M  
26 Jumadil Akhir 1440 H

#### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
Sekretaris	: Dr. Hamsir, S.H., M.Hum
Munasyiq I	: Dr. H. Supardin, M.H.I.
Munasyiq II	: H. Zulfahmi Alwi, M.Ag., Ph.D
Pembimbing I	: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag
Pembimbing II	: Dra. Hj. Hartini, M.H.I

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh:



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
NIM: 19521046190031003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta taslim senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Saw. Beserta sahabat dan keluarganya sebagai suri tauladan terbaik di muka bumi. Skripsi ini berjudul " TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAPA ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN ( Studi Kasus Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone Tahun 2018 )" yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum. Skripsi tidak akan bisa berada dihadapan pembaca tanpa campur tangan dan bantuan dari berbagai pihak. Melalui tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada Kedua orangtua (Ahmad dan Idarmawati) yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan dengan sabar terus membimbing penulis. Doa yang tulus terus mengalir yang menjadi penguat dalam setiap langkah hingga menyelesaikan studi di kampus peradaban UIN Alauddin Makassar .

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. kepada Wakil Rektor I. Wakil Rektor II, Wakil Rektor III dan Wakil rektor IV UIN Alauddin Makassar.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., kepada Wakil Dekan I Bidang Akademik, Wakil Dekan II Bidang Keuangan, dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan serta staff.
3. Ayahanda ketua Jurusan Peradilan, Dr. H. Supardin, M.H.I dan Ibunda yang telah Menjadi orangtua kedua selama penyelesaian studi di kampus peradaban. Ibunda sekertaris jurusan Dr. Hj. Patimah, beserta staff.
4. Bapak Dr. H. Muh. Saleh Ridwan M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Hartini Tahir, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak pelajaran, Motivasi belajar dan terus berbenah diri, telah Menjadi orang tua bagi penulis.
5. Bapak Dr. H. Supardin, M.H.I. selaku penguji I skripsi dan Bapak H. Zulfahmi Alwi, M.Ag.,Ph.D. selaku penguji II skripsi.
6. Seluruh dosen dan staff di Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak bosan memberi nasehat dan saran serta ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kepada Keluarga Besar Alumni Sman 1 Dua Boccoe 2014 Saudara seperjuanganku yang telah memberi banyak motivasi, semangat hidup serta bantuan yang tak henti-hentinya.
8. Kepada Keluarga Besar Alumni Pesantren As-Adiyah Putra II Sengkang yang telah memberikan banyak masukan-masukan serta saran.
9. Kepada Teman-teman seperjuanganku Jurusan Peradilan Angkatan 2014 atas kebersamaan selama kurang lebih 4 tahun di Kampus , canda dan tawa menjadi saksi kebersamaan kelas Peradilan C. Terima Kasih

atas kesetiawakanan selama ini dan motivasi kebersamaan yang luar biasa..

10. Teman-teman KKN Angkatan 57 terkhusus pada Posko Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan, selama dua bulan lamanya kebersamaan kita.
11. Keluarga Besar DPC Kepmi Bone Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone .
12. Keluarga Besar Asrama II Kepmi Bone
13. Teman-teman sekomunitas Pusaka Selle Bessi
14. Teman-teman dpk latenriruwa
15. Kakak dan adekku yang selalu mendoakan kelancaran, memberi semangat, memberi dukungan, motivasi, mendukung mengomeli setiap saat demi terselesaikan tugas akhir ini.
16. Teman serta sahabat se-Almamater “Fakultas Hukum” dalam menyelesaikan Program Studi S1 Peradilan Agama.
17. Teman seperjuangan syamzir, syahril, mustamir, sofian, iman zoelva, ahmad, taufik, ulil, nasrul, dan teman-teman yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya saya mengucapkan banyak terimah kasih atas arahan dan sarannya sehingga tujuan utama datang di makassar tercapai, berkat doa dan dukungan teman-teman.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka semua yang telah turut andil dalam kepenulisan dan tanpa bosan memberikan dukungan, motivasi dan semangat terkhusus kepada kedua Orang tua. Kepada mereka yang pusing karena lamanya penulis menyelesaikan studi jenjang S1, itu adalah bentuk kasih sayang

kepada penulis yang diekspresikan dengan cara yang berbeda. Kepada mereka yang dengan tulus mendoakan kesuksesan penulis. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini Penulis ucapkan *Jazakumullah Khairan Khasira*.

Akhirnya dengan segala penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa mana kalah terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Makassar, 03 Januari 2019.

Penulis,

Muhammad Ismail

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR..	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xix
BAB I    PENDAHULUAN.....	1-13
A. Latar Belakang Masalah..	1
B. Fokus Penelitian dan Deskriptif Fokus.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka..	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..	12
BAB II    TINJAUAN TEORETIS.....	14-46
A. Tinjauan yuridis ..	14
1.    Pengertian tinjauan yuridis ..	14
2.    Macam-macam tinjauan yuridis...	18
B. Tanggung jawab orang tua terhadap anak ..	29
1.    Pengertian tanggung jawab orang tua terhadap anak ..	29
2.    Hak dan kewajiban orang tua..	30
3.    Hak dan kewajiban anak.....	32



C. Terjadinya perceraian ..	32
1. Pengertian perceraian ..	32
2. Jenis-jenis perceraian ..	35
3. Penyebab-penyebab terjadinya perceraian ..	36
4. Akibat hukum perceraian ..	39
5. Dampak Perceraian Terhadap Anak ..	43
D. Studi kasus ..	45
1. Pengertian studi kasus ..	46
2. Macam-macam studi kasus.....	47
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN..</b>	<b>48-54</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Sumber Data..	49
D. Metode Pengumpulan Data.....	50
E. Instrumen Penelitian..	51
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data..	52
G. Pengujian Keabsahan Data..	53
<b>BAB IV TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DAN AKIBAT HUKUM BAGI ORANG TUA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN BERDASARKAN PERATURAN UNDANG-UNDANG DAN KOMPLASI HUKUM ISLAM.....</b>	<b>55-84</b>
A. Gambaran Umum Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone.....	55
B. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian di	

Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone .....	69
C. Akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak setelah perceraian di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone.. .....	77
BAB V PENUTUP.....	85-87
A. Kesimpulan.....	85
B. Implikasi Penelitian.. .....	86
DAFTAR PUSTAKA.. .....	88-89
LAMPIRAN.....	90-100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	101

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. *Transliterasi Arab Latin*

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	ja	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di atas)
خ	kha	kh	kadan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	a apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	min	l	En
ن	nun	n	En
و	wa	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	a	a
اِ	kasrah	i	i
اُ	dammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah</i> dan yā'	ai	a dani
وَ	<i>fathah</i> dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	huruf dan tanda	nama
أ... / آ...	fathah dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas
ى	kasrah dan yā'	i	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. *Tā' Marbūṭah*

*Transliterasi* untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah :

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al- at fāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madinah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini di lambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ى ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia di transliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

رَبَّنَا	: <i>rabbnā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمُ	: <i>nu''ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf *kasrah*, maka ia di transliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby).

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedomant ransliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang di tulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syams</i> ( <i>bukanasy-syam</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> ( <i>bukanaz-zalzalalah</i> )
الْفُلْسَفَةُ	: <i>al-falsalah</i>
الْبَلَادُ	: <i>al-bilād</i>

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia.

تُؤْمِرُونَ	: <i>ta'murūtn</i>
النَّوع	: <i>al-nau'</i>
شَيْء	: <i>syai'</i>
أَمْرَت	: <i>umirtu</i>

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi di tulis menurutara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus di transliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnahqabl al-tadwin*

#### 9. Lafẓal-Jalāl(الله)



Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ : *dinullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang di sandarkan kepada *lafẓ al-Jalālah* di transliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kafital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, di gunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang (al-), maka yang di tulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia di tulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wamā Muhammadunillārasul*

*Inna awwalabaitinwudi'alinnāsiIallazi bi Bakkatamubārakatan xiv Syahru*

*Ramadān al-laziunzilafiih al-Qur'ān*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

**B. *Daftar Singkat***

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah

swt. = *subhanahu wa ta'ala*

saw. = *sallallahu „alaihi wa sallam*

a.s. = *„alaihi al-salam*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun ( untuk orang yang masih hidup saja )

w. = Wafat tahun

QS..../:.....: 4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imran/3:4

HR = Hadis Riwayat

## ABSTRAK

**Nama** : Muhammad Ismail

**NIM** : 10100114143

**Judul** : Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Setelah terjadinya Perceraian (Studi Kasus Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone Tahun 2018)

---

penelitian ini adalah tinjauan yuridis tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian dibentuk dalam dua rumusan masalah, yaitu: 1) Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone. 2) akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak setelah perceraian di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone, dengan tujuan Untuk mengetahui bagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian. Untuk mengetahui akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak setelah perceraian. di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone.

Jenis penelitian ini tergolong faield research kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: sosiologis, normatif (syar'i) dan pendekatan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan memulai empat tahapan, yaitu: reduksi data, display data, analisis perbandingan dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam bentuk nafkah anak akibat perceraian di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone dalam tinjauan kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak sesuai dengan ketentuan dalam kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua, rendahnya pendidikan orang tua, serta rendahnya moral orang tua.

Implikasi dari penelitian ini adalah agar kompilasi hukum Islam dapat berjalan baik di masyarakat, khususnya terkait tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam bentuk nafkah anak akibat perceraian maka seharusnya ada sosialisasi dan kontrol dari pemuka agama dan tokoh masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian terkait undang-undang perlindungan anak juga perlu ada sosialisasi, kerjasama dan kontrol dari negara, pemerintah, dan masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar pemenuhan hak-hak anak khususnya setelah perceraian dapat berjalan dengan baik dan tentunya sesuai dengan kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Kodrat manusia adalah sebagai makhluk sosial dimana tidak bisa hidup sendirinya tanpa bergantung dengan manusia yang lainnya, meskipun pada awalnya ia telah lahir seorang diri, manusia diciptakan oleh tuhan di dunia untuk hidup bersama, berdampingan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya dan manusia mempunyai keinginan untuk hidup bahagia, sebagai pelengkap atas kebahagiaan itu manusia memilih untuk mencari pasangan hidup yang akan di bawah dipernikahan dan dari pernikahan bahagia itu akan menghasilkan buah hati (anak) dari hasil pernikahan<sup>1</sup>.

Perkawinan bukanlah keperluan sesaat tetapi jika mungkin bisa saja hanya satu kali dalam hidup karena perkawinan mengandung nilai leluhur, dengan adanya ikatan lahir batin antar pria dan wanita yang dibangun atas nilai yang sakral. Perkawinan salah satu naluri manusia, karena dengan adanya perkawinan tumbuh rasa saling memberi, memilih dan saling membantu, sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Perkawinan merupakan awal hidup bersama dalam suatu ikatan yang diatur dalam perundang-undangan dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia, seperti dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: tujuan perkawinan adalah juga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Anak dalam masyarakat pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dengan acara pernikahan, terdapat doa dan restu dan harapan semoga kedua insan

---

<sup>1</sup>K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, h. 15.

atau kedua mempelai dikaruniai seorang anak tentunya anak-anak lahir diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga nusa dan bangsa dimasa akan datang.

Anak adalah anugrah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk dijaga dan dilindungi dengan hak-haknya sebagai seorang anak karena anak inilah kita siapkan untuk menjadi manusia-manusia yang tangguh dan kuat untuk meneruskan cita-cita keluarga sekaligus menjadi generasi penerus untuk bangsa. Dikatakan sebagai generasi penerus karena apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dan melanjutkan roda berputarnya suatu kehidupan di dalam negara dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa baik pemerintah maupun non pemerintahan memiliki kewajiban secara serius memberi perhatian atau pertumbuhan dan perkembangan anak orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah adalah komponen yang wajib melaksanakan pembinaan pada setiap anak<sup>2</sup>.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita dengan kerugian (mental, fisik dan sosial) karena yang pasif atau tindakan yang pasif orang lain kelompok baik langsung maupun tidak langsung pada hakekatnya anak tidak bisa melindungi diri sendiri dari berbagai kerugian jika itu mental maupun fisik.

Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut Undang-Undang Dasar 1945 terhadap dalam kebijaksanaan dalam pasal 34 pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang

---

<sup>2</sup> Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Rafika Aditama, h. 29.

politik karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak pengertian menurut UUD 1945 dan pengertian politik melahirkan atau menonjolkan hak-hak yang harus diperoleh anak oleh masyarakat bangsa dan negara atau dengan kata yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih yang bertanggung jawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.

Anak memiliki arti berbeda-beda bagi setiap orang, anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan pringkat hidup sehingga dapat mengontrol stataus sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus.<sup>3</sup>

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah swt, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga di bandingkan kekayaan harta benda lainnya.<sup>4</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-kahfi/18:46:

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ  
أَمْلاً

---

<sup>3</sup>Siska Lis Lulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, 2001 .h. 5.

<sup>4</sup>Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), h. 1.

Terjemahnya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.<sup>5</sup>

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari sebagai pengaruh sistem yang ada.<sup>6</sup> Itu dikarenakan anak adalah makhluk yang lemah yang tidak berdaya, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian.<sup>7</sup>

Pengertian anak menurut UUD 1945 dijabarkan sebagai berikut “ketentuan UUD 1945 ditegaskan pengaturan dengan di keluarkannya UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak” yang berarti makna anak (pengertian anak) yaitu seorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmani, maupun sosial atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial, anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar<sup>8</sup>.

Pengelompokan anak menurut pengertian hukum perdata, dibangun dari berbagai aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai subjek hukum yang tidak maupun aspek itu menyangkut “status belum dewasa yaitu anak yang berumur 21

---

<sup>5</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 299.

<sup>6</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), h.15.

<sup>7</sup>MG. Endang Sumiarni dan Candra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2000), h. 7.

<sup>8</sup>Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Grasindo, h. 17 .

tahun dan belum pernah kawin sebagai subjek hukum dan hak-hak anak di dalam hukum perdata” pada kedudukan anak, akibat karena belum dewasa menimbulkan hak-hak anak yang perlu direalisasikan dengan ketentuan hukum khusus yang menyangkut urusan hak-hak keperdataan anak tersebut.

Sebagaimana termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1 yaitu: *“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik baiknya”* Sedangkan ayat 2 di sebutkan yaitu: *“kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus”*

Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 45 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pendidikan yang dibutuhkan pada anak tidak hanya pendidikan formal saja tetapi pendidikan dalam keluarga juga tidak kalah pentingnya oleh karena itu pendidikan anak sejak dini sangat berperan sekali karena dalam keluarga seorang anak dapat pengajaran mulai dari bertutur bahasa baik berperilaku sopan santun terhadap orang lain dan membina anak agar bisa berprestasi dan bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya dalam hal ini pengawasan terhadap anak memang harus diterapkan sejak dini agar anak nantinya tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang terjadi pada pemudha sekarang.



Keluarga orang tua adalah orang pertama yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak serta biaya pemeliharaan dan pendidikan yang merupakan hak anak namun demikian tidak jarang hal seperti itu terputus, baik atas kehendak suami istri maupun di luar kehendak mereka berdua hal ini dikarenakan hubungan keluarga antara suami dan istri tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan. Faktor pemicu perceraian ialah pertengkaran dalam rumah tangga yang umum di sebutkan oleh faktor ekonomi karena kebutuhan yang diperlukan dalam keluarga tidak lagi sesuai dengan pendapatan yang di dapat, artinya kebutuhan yang lebih besar tidak sebanding dengan pendapatan yang di hasilkan, selain itu perceraian yang terjadi di masyarakat sekarang ini tidak sedikit karena adanya faktor lain atau orang ketiga yang masuk dalam suatu rumah tangga sehingga hubungan suami istri tidak lagi harmonis.

Percerain itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah iktiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan pada perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lagi kecuali dengan perceraian antar suami dan istri pada akhir-akhir ini bukan suatu yang tabu pada kenyataan banyak sekali terjadi perceraian yang dialami oleh masyarakat maupun selebritis, hal ini terbukti sudah banyak istri pada saat ini telah berani menggugat cerai kepada suaminya. Hal ini terjadi karena telah dilatar belakangi oleh adanya kesetaraan perempuan dengan laki-laki yaitu mendapat kesempatan yang sama dalam segala bidang khususnya dibidang pekerjaan dapat dilihat masa sekarang banyak wanita karier yang bekerja untuk kebutuhan hidup rumah tangganya dalam keluarga pendapatan seorang istri tidak jarang pendapatan yang di perolehnya melebihi pendapatan suami oleh karena itu para istri berani menggugat suaminya untuk cerai. Terjadi perceraian dalam rumah tangga mengakibatkan pengaruh yang buruk pada perkembangan mental atau jiwa anak terutama anak yang masih di bawah umur 21 tahun tidak terkecuali

perceraian terjadi karena keegoisan orang tua tanpa mengedepankan kepentingan anak itu sendiri akibat dari perceraian kedua orang tua maka kehidupan anak dalam keluarga sudah tidak berjalan normal lagi yaitu tidak lagi mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya selayaknya dari keluarga yang utuh.

Lingkungan masyarakat seorang anak akan timbul rasa iri melihat teman-temannya yang memiliki keluarga yang rukun dan orang tua yang tidak bercerai. Hal ini dapat mempengaruhi aktivitas anak dalam mengekspresikan dirinya. Selain itu perceraian besar pada mempengaruhi anak akan mengalami rasa traumatik melihat orang tuanya tidak bersama lagi rasa trauma pada anak tidak berkelanjutan maka suami atau istri yang sudah bercerai sebaiknya membawa anaknya ke lembaga konseling yang konseng pada pada kepentingan anak guna mendapatkan pengajaran dan pencerahan yang lebih terarah dengaterjadinya perceraian maka kekuasaan orang tua (*ouderlijk macht*) berakhir dan berubah menjadi perwalian (*voogdij*)<sup>9</sup>.

Selain itu terdapat dalam pasal 26 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan Anak yang menyatakan:”*orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk*”:

1. *Mengasuh,memelihara,mendidik,dan melindungi anak*
2. *Menumbuhkan,mengembnagkan,anak sesuai dengan kemampuan,bakat dan minatnya dan*
3. *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia nak-anak”.*

Seiring berjalannya waktu semakin banyak pula kasus perceraian dan dari perceraian itupun juga akan mengakibatkan berbagai akibat hukum termasuk salah satunya yaitu tanggungan orang tua untuk tetap memberikan tanggungan dan

---

<sup>9</sup>Arif Masdoeki dan M.H Tirtahamiddjaja, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademik Persindo, 2011, h. 15.

kewajiban kepada anak. Dari kasus perceraian-perceraian yang ada terdapat berbagai varian diantaranya ada yang dalam putusan pengadilan menuntuk mengenai nafka terhadap anak dan ada pula yang tidak. Permasalahannya adalah ketika putusan pengadilan memutuskan untuk membebaskan kepada salah satu orang tua dari sang anak maka hal itu pula harus dilaksanakan oleh orang tua yang dibebaskan dari pengadilan dalam putusan pengadilan untuk memberikan nafkahnya kepada anak atau hak-hak yang harus diperoleh oleh anak.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskriptif Fokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini untuk memberikan batasan-batasan agar penelitian ini jelas ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu penelitian ini, lebih fokus pada:

- a. Tinjauan yuridis..
- b. Tanggung jawab orang tua terhadap anak.
- c. Terjadinya perceraian.
- d. Studi kasus.

### **2. Deskripsi Fokus**

Untuk menyempurnakan penulisan dan untuk memberikan batasan pengertian dalam penulisan. Maka penulis memberi beberapa batasan pengertian dari beberapa istilah yang tercantum dalam penulisan ini :

- a. Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Baik dalam hukum islam maupun hukum positif.
- b. Tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah melindungi anak dari berbagai macam prasarana yang dapat merusak dan mengganggu psikolog anak, mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan

mengajarkan nilai-nilai budi pekerti, seperti kesopanan, tanggung jawab, agama, kedisiplinan, dan kepedulian sesama manusia. Memberikan uang pendidikan, nafkah anak, dan pemeliharaan anak baik sebelum terjadinya perceraian maupun setelah terjadinya perceraian.

- c. Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri, yang dilakukan depan sidang pengadilan yaitu pengadilan agama bagi yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non islam.<sup>10</sup>
- d. Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut kasus baik itu cerai mati, cerai gugat dan cerai talak.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun pokok permasalahan yang diangkat adalah “bagaimana tinjauan yuridis tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone.?” Atas dari pokok masalah tersebut dirumuskan dalam 2 submasalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone?
2. Bagaimana akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak setelah perceraian di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone?

---

<sup>10</sup>Artikel Ilmiah, Hasil Penelitian Mahasiswa 2013.

#### **D. Kajian pustaka**

Terdapat beberapa literatur yang membahas tentang dampak hukum bagi orang tua terhadap anak setelah perceraian dalam bentuk buku dan skripsi, diantaranya:

1. Dalam buku prof. Mohammad Taufik Makarao, S.H, MH. Dkk, yang berjudul hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dijelaskan bahwa untuk mencegah melindungi korban, dan menindak perilaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan perlindungan dan penindakan pelaku sesuai falsafah Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.<sup>11</sup>
2. Dalam buku prof. Maidin Gulton, AS.H M.Hum. yang berjudul perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Di jelaskan bahwa keluarga dan kekerasan sekilas seperti pradox. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara disisi lain keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung. Kerugian korban kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya berpengaruh terhadap material tetapi juga immaterial, seperti psikologis yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan. Kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak rawan. Disebut adalah karena kedudukan anak dan

---

<sup>11</sup>Muhammad Taufik Makarao,Dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* ( Jakarta PT R, Media, 2003), h.175

prempuan yang kurang menguntungkan anak dan prempuan mempunyai resiko yang besar mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya.<sup>12</sup>

3. Fiqhi sunnah karangan Sayyid Sabiq. Buku ini membahas masalah perkawinan. Dalam buku ini menjelaskan bagaimana proses hadhanah setelah terjadi perceraian bagi anak yang masih di bawah umur.
4. Fiqhi munagaha oleh prof. Dr. Abdurrahman Ghozali, M.A, dalam buku ini membahas pengertian, syarat-syarat, dan larangan perkawinan serta pandangan Hukum Islam terhadap hak asuh anak setelah perceraian.<sup>13</sup>
5. Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqhi munaqaha dan Undang-Undang perkawinan oleh prof. Amir Syarifuddin, dalam buku ini membahas pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan serta hak asuh anak.<sup>14</sup>
6. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
8. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
9. Intruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Pembedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat beberapa variabel seperti tanggung jawab, akibat hukum, dan upaya seorang wali apabila seorang ayah tidak menjalankan tanggung jawab hukumnya

---

<sup>12</sup>Maidan Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Prempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h.15.

<sup>13</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqhi Munaqahat* (Jakarta: Kencana, 2008), h.103.

<sup>14</sup>Amir Syrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqhi Munaqaha dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta, Kencana, 2007), h. 36.

terhadap anak setelah perceraian yang belum diangkat dan diteliti oleh penelitian sebelumnya.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian.**

Berangkat dari pokok, masalah di atas, maka tujuan utama atau pokok dari penyusunan skripsi ini bagaimana tinjauan yuridis tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian di desa waji kecamatan tellusiattinge ini dijabarkan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak setelah perceraian.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut :

- a. Di harapkan dapat menjadi sumber referensi bagi masyarakat terutama bagi mereka yang ingin mengetahui bagaimna perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian.
- b. Agar dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan bahan bacaan bagi masyarakat pada umumnya.
- c. Mengakaji dan mengetahui akibat hukum dari perceraian bagi orang tua yang tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak setelah perceraian.
- d. Dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi penelitian sebagai dasar bagi Pengadilan Agama di Indonesia dalam

meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga pengadilan yang senantiasa menegakkan keadilan dan menjamin kepastian hukum.

- e. Memberikan sumbangsih pemikiran ataupun bahan masukan terhadap pihak-pihak yang terkait tentang masalah perkawinan atau masalah mengenai tanggung jawab orang tua untuk memberikan kewajibannya kepada anak setelah perceraian.
- f. Dengan adanya penelitian ini di harapkan agar memberikan manfaat tentang tanggung jawab orang tua untuk memenuhi kewajibannya setelah perceraian atau pemenuhan hak anak setelah perceeraian yang terjadi di indonesia pada umumnya dan lingkup masyarakat terdekat kita pada khususnya Desa Waji. Sehingga dapat dijadikan sebagai bingkai cara berfikir, serta bertindak dalam mengambil keputusan dalam mewujudkan keadilan dalam memberikan kewajiban kepada anak.
- g. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam hal pengembangan dan ilmu hukum, terutama di bidang hukum perkawinan.
- h. Penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan di Indonesia dan menjadi bahan refrensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang telah lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Yuridis

##### 1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, pandangan, pendapat(sesudah menyelidiki, mempelajari,).<sup>15</sup> Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>16</sup> Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Pengertian yuridis adalah hukum baik secara tertulis maupun secara lisan. Yuridis yang tertulis diantaranya adalah undang-undang sedangkan yuridis yang berupa lisan adalah hukum adat. Sekalipun dalam bentuk lisan namun adanya adat tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat. Jika seseorang atau beberapa orang melanggar hukum lisan maka dia akan tetap mendapatkan sanksi. Yuridis adalah peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat dan jika mereka melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi. Jika hukum tertulis sanksinya adalah dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Namun jika hukum lisan maka sanksi pelanggaran bisa datang dari masyarakat sendiri.

Secara yuridis, yang dimaksud anak adalah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Ke IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), h. 1470.

<sup>16</sup>M. Marwan Dan Jimmy P. 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, h.651.

<sup>17</sup>Tan Kamello Dan Syarifah Lisa Adriati, Op.Cit, h.68.

a. Kedudukan Hukum Anak

Mengenai kedudukan hukum anak diatur di dalam pasal 42 sampai dengan pasal 44 dan pasal 55 Undang-Undang Perkawinan.

Dalam hal ini perlu diketahui UU perkawinan membedakan anak dalam perkawinan atas anak yang sah dan anak yang tidak sah, ketentuan dalam pasal 42 UU perkawinan menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, anak yang sah dalam perkawinan meliputi:

1. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilangsungkan, termasuk pula kawin hamil.
2. Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah, yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilakukan kemudian orangtuanya bercerai.<sup>18</sup>

b. Hak-Hak Anak

Hak anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diatur dalam pasal 52 sampai dengan pasal 66.

Ulama fikhi mendefinisikan wilayah dengan: “wewenang seseorang bertindak hukum atas orang yang tidak cakap bertindak hukum, baik untuk kepentingan pribadinya maupun untuk kepentingan hartanya, yang diizinkan oleh syara’.”<sup>19</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum diadakan perwalian yaitu firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah/2:282:

---

<sup>18</sup>Ibid, h.351.

<sup>19</sup>Mustafa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga(Bandung: Cv Pustakasetia, 2011), h..277.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا  
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.<sup>20</sup>

Pada dasarnya setiap orang mempunyai “kekuasaan berhak” karena merupakan subjek hukum. Tetapi tidak semua orang cakap melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Secara umum, orang-orang yang disebut *meerderjaringheid* dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah, kecuali jika Undang-Undang tidak menentukan demikian.

Sebuah pendapat mengemukakan bahwa, “pemeliharaan anak dinamakan *voogdij* (perwalian)”, sedangkan selama perwalian berlangsung, pemeliharaan anak yang berada di tangan kedua orangtua, dinamakan kekuasaan orang tua.<sup>21</sup>

Anak yang berada di bawah perwalian adalah anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaanya sebagai orang tua, anak sah yang orang tuanya telah bercerai, anak yang lahir di luar perkawinan.

<sup>20</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 48.

<sup>21</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*(Bandung: Sumur Bandung, 1989),h.71.

c. Asas Perwalian

Ketentuan tentang perwalian diatur dalam KUHPerdara pasal 331 sampai dengan pasal 344 dan pasal 50 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

1. Asas tak dapat dibagi-bagi(*ondeelbaarheid*)
  2. Asas kesepakatan dari keluarga
  3. Orang-orang yang dipanggil jadi wali.<sup>22</sup>
- d. Sebab-sebab terjadinya dan berakhirnya perwalian

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perwalian terjadi karena beberapa faktor:

1. Wali dapat ditunjuk oleh salah seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dengan dua orang saksi.
2. Wali sedapat-dapatnya diambil; dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.<sup>23</sup>

Demikian halnya Pasal 53 UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan wali dapat diganti atau dicabut dari kekuasaan, yaitu dalam hal:

- 1) Wali sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak perwalian tersebut.
- 2) Wali berkelakuan buruk sebagai walinya.

---

<sup>22</sup>Titik Triwulantutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukumnasional*, h.89.

<sup>23</sup>Pasal 51 Undang-Undang Perkawinan.

Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dalam hubungan dengan keadaan anak dan dalam hubungan tugas wali.<sup>24</sup>

1) Dalam hubungan dengan keadaan anak

Dalam hubungan ini, perwalian akan berakhir karena:

- a. Anak yang dibawah pewalialan telah dewasa
- b. Anak meninggal dunia
- c. Timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya
- d. Pengesahan seorang anak diluar kawin

2) Dalam hubungan dengan tugas wali

Berkaitan dengan tugas wali, maka perwalialan akan berakhir karena:

- a. Wali meninggal dunia.
- b. Dibebaskan atau dipecat dari perwalialan (*ontzetting of ontheffing*)
- c. Ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalialan (pasal 380 BW).

2. Macam-macam tinjauan yuridis

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Anak merupakan amanah dan karuniah Allah swt. Sebagai generasi penerus dalam keluarga bangsa dan negara. Oleh sebab itu maka anak harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari seluruh aspek kehidupan. Dalam kehidupan manusia, anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial (konvensi hal anak) dinyatakan bahwa yang disebut anak

---

<sup>24</sup>Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdara* (Cet, Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 160.

adalah manusia atau seseorang yang berusia di bawah 18 Tahun. Akibat dari belum matannya individu anak, maka sangat dibutuhkan perlindungan dari orang dewasa. Sumber Islam Al-qur'an dan hadist keduanya banyak menegaskan betapa pentingnya perlindungan terhadap anak. 15 abad yang lampau dalam firman Tuhan telah mengingatkan kepada kita selaku ummat Muhammad saw. Sebagaimana termaktub di dalam QS. Al-Ma'un ayat 1-7 surah 107:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
2. Itulah orang yang menghardik anak yatim,
3. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,
5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,
6. Orang-orang yang berbuat riya,
7. Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.<sup>25</sup>

Dengan tegas ayat di atas memberikan gambaran bahwa adanya sebuah kewajiban yang harus dilakukan secara berkesinambungan agar memberi perlindungan gambaran dan pengayoman kepada memberi sesuatu yang terbaik demi kesejahteraan mereka Islam yang dibawa Rasulullah saw. Dan yang dipraktekannya menjadi teladan bagi ummatnya.

Dalam upaya melindungi anak dunia internasional bersepakat untuk membuat suatu aturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Pada 28

---

<sup>25</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h.1108

november 1989 majelis umum PBB telah mengesahkan konvensi hak anak (KHA) atau CRC (*convention on the rights of the child*). Setahun setelah konvensi anak disahkan pada 25 Agustus 1990 Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui keputusan Presiden No 36 1990 dan mulai berlaku sejak 5 oktober 1990. Dengan ikutnya Indonesia dalam mengesahkan konvensi tersebut maka Indonesia terikat dengan konvensi hak anak dengan segala konsekuensinya. Artinya, setiap yang menyangkut tentang kehidupan anak harus mengacu kepada konvensi hak anak dan tak ada pilihan lain kecuali melaksanakan dan menghormati konvensi hak anak dan apabila Indonesia tidak melaksanakan dan menghormatinya maka memiliki pengaruh negatif dalam hubungan internasional.

Dalam mewujudkan pelaksanaan dari konvensi anak tersebut maka pemerintah Indonesia telah membuat aturan dalam upaya melindungi anak. Aturan hukum tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002. Umat Islam telah diperingatkan oleh Tuhan betapa pentingnya perlindungan anak demi menghadapi generasi mendatang. Hal ini tersebut tersurat di dalam QS. Annisa 4/9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.<sup>26</sup>

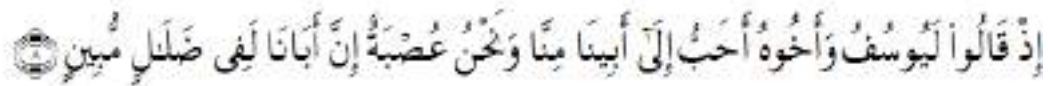
Adapun prinsip dasar CRC yaitu : non discrimination, the best interest of child, right of survival dan develop and participation:

---

<sup>26</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h.71.

a. Nondiskriminasi ( discrimination )

Prinsip dasar yang pertama ini dimaksudkan dalam penyelenggaraan bahwa dan kesejahteraan serta perlindungan terhadap anak adaalah tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang suku, ras, adat budaya, status, jenis kelamin, agama dan golongan. Dalam UU KPA No. 23 Tahun 2002 pasal 13 dan 17 dijelaskan bahwa perlindungan anak dari diskriminasi adalah hak yang dilindungi hukum dan bagi yang melanggar hak tersebut akan dipidana, khususnya dalam bidang pengasuhan anak. QS Yusuf/8:



Terjemahnya:

“(yaitu) ketika mereka berkata: "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunjamin) lebih dicintai oleh ayah kita dari pada kita sendiri, padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata”.<sup>27</sup>

Dari ayat tersebut di atas, secara implisit dapat dipahami bahwa hendaknya memperlakukan anak-anak tidak diskriminasif baik terhadap anak sendiri maupun terhadap anak-anak secara umum terlebih terhadap anak yatim.

Non deskriminasi Rasulullah saw dalam berbagai perjamuan yang dihadiri para sahabat tidak saja dalam bentuk materi, Namun juga dalam bentuk psikis. Sabda Rasulullah saw *kulmimmayali*. Misalnya, Rasulullah saw juga mengingatkan kita, Jika orang tua ingin dihormati dan dihargai, Maka anak-anak harus dididik dengan baik dan diperlakukan adil tidak deskriminatif, Tidak memihak.

---

<sup>27</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h.189.



Rasulullah . Juga telah merenkontruksi perlakuan Bangsa Arab yang tidak adil mengenai gender. Prealktek kesetaraan dan keadilan gender telah di inflamentasikan, Sabdanya *mallamyarham la yarhamullah*.

- b. Asas hak untuk hidup, kelanGsungan hidup perkemb2angan anak (surpipal and depelohman of child).

Prinsip dasar kedua adalah hak asasi untuk hidup, Kelangsungan hidup dan hak untuk berkembang bagi anak. Dalam CRC atau dalam KHA ditegaskan adanya jaminan bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Setiap anak memiliki hak kehidupan yang melekat (inherent right of life) yang secara maksimal akan dijamin. Hak asasi mendasar inilah hak untuk hidup dan kelangsungan hidu, yaitu hak akan identitas dan kewarganegaraan (KHA pasal 7). Pemberian hak identitas di negeri kita kenal dengan akte kelahiran. Akte kelahiran menjadi bukti otentik yang memiliki kekuatan hukum atas jati diri seseorang.

Dalam islam, sejak anak berada dalam kandungan, sudah mulai diperhatikan kehidupan dan perkembangannya, agar bayi lahir dengan sehat dan selamat. Diberi nama yang indah (Reasulullah mengganti nama yang jelek Bukhari Muslim, Turmudzi) dengan harapan agar menjadi sugesti bagi anak dalam mengarungi kehidupannya. Demikian juga anak sejak dini telah dibiasakan mendengar, melihat lingkungan sekitarnya dengan tindak dan bahasa yang santun dan ramah, sebagaimana disabdakan oleh rasulullah . *Akrimu auladakum wa ahsimu adabahum* (Muliakanlah anak-anakmu dengan memberi pendidikan yang baik dan ajari sopan santun-ibnu maja).<sup>28</sup>

## 2. Hukum Positif

---

<sup>28</sup>Gosita, Arief, Makalah *Pengembangan Aspek Hukumundang-Undangperadilan Anak Dan Tanggung Jawab Bersama*, Seminar Nasional Perlindungan Anak, Diselenggarakan Oleh Unpad, (Bandung 5 Oktober 1996).

Peraturan perundangan di Indonesia yang memberikan landasan bagi perlindungan hukum terhadap anak baik secara pidana maupun pidana hingga saat ini telah sangat lengkap, antara lain:

- a. Pasal 28 huruf B ayat (2) UUD 1945 yang menjadi dasar hukum bagi semua peraturan di bawahnya, menyatakan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Ketentuan ini menjadi landasan hukum bahwa Negara, pemerintah, dan masyarakat wajib memperhatikan kelangsungan hidup anak bangsa dan memberikan perlindungan hukum dari segala tindakan yang mengarah kepada kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.
- b. UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang kesejahteraan anak, peraturan ini memperjelas lagi kewajiban orang tua terhadap anaknya, yaitu : memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya, dengan memenuhi hak-haknya atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang.
- c. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menegaskan tentang hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap kelangsungan hidup anak dengan segala aspeknya.

Hak Asuh anak "*hadhanah*" berasal dari bahasa arab (حضان - يحضن - حضنا) yang berarti mengasuh, merawat memeluk.<sup>29</sup> Dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>Yan Tirtobisono Dan Ekrom Z, *Kamus Arab Inggris Indonesia*, Surabaya: Apollo, 1997, h.176.

## 1. Hukum Islam

Pernikahan tidak selalu berjalan mulus, terkadang justru berakhir dengan perceraian. Perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengurai benang kusut perjalanan bahtera rumah tangga. Sayangnya, perceraian tidak selalu membawa kelegaan. Sebaliknya, seringkali perceraian justru menambah berkobarnya api perseteruan. Layar kaca pun sering menanyakan perseteruan pada proses maupun pasca perceraian yang dilakukan oleh para publik figur Indonesia melalui tayangan-tayangan infotainment. Salah satu pemicu perseteruan adalah masalah hak asuh anak.

Ayah yang pada awalnya adalah kepala keluarga merasa berhak penuh atas hak asuh anak. Di sisi lain, ibu sebagai pengelola keluarga yang telah hamil, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik anak, juga merasa berhak penuh atas hak asuh anak.

Ahmad, Abu Daud, dan AL-Hakim telah meriwayatkan dari Abdullah bin amr :Bahwa seorang wanita berkata:

“Ya Rasul Allah, sesungguhnya anak saya ini, perut saya yang telah mengandungnya, dan tetek sayalah menjadi minumannya dan haribaankullah yang melindunginya. Tetapi bapaknya telah menceraikan aku dan hendak menceraikan anakku pula dari sisiku.”

Maka Rasulullah bersabda:

“Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum kawin (dengan orang lain)

Demikian halnya saat Umar bin Khattab menceraikan ummu Ashim dan bermaksud mengambil Ashim bin Umar dari pengasuhan mantan istrinya. Keduanya pun mengadukan masalah ini kepada Abu Bakar r.a selaku amirul mukminin saat itu.

Abu Bakar berkata:

“Kandungan, pangkuan, dan asuhan Ummu Ashim lebih baik bagi Ashim dari pada dirimu (Umar) hingga Ashim beranjak dewasa dan dapat menentukan pilihan untuk dirinya sendiri.”

Ayah dan ibunya adalah orang tua anak-anaknya. Walaupun ayah dan ibu telah bercerai, anak tetap berhak mendapat kasih dan sayang dari keduanya. Ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya. Anak berhak menjadi ahli waris karena merupakan bagian dari nasab ayah dan ibunya. Anak gadis pun harus dinikahkan oleh ayahnya, bukan oleh ayah tiri.

Adapun nasib bagi ibu yang telah menjanda akibat di ceraikan suaminya, maka ia berhak mendapat nafkah dari suami hingga masa iddahnya berakhir (tiga kali haid) serta upah dalam pengasuhan anak baik dalam masa iddah maupun setelahnya hingga anak mencapai fase tamyiz (berakal) dan melakukan takhyir yang memungkinkan ia untuk memilih ikut ayah atau ibu.

Jika anak belum mencapai fase tamyiz (berakal), maka ibu tetap berkewajiban mengasuh anaknya. Apabila ibu tidak mampu mengasuh anaknya (misalnya karena : kafir/murtad, tidak waras, dan sebab syar'i lainnya yang tidak memungkinkan dia mengasuh dan mendidik anak). Maka pengasuhan dapat dilakukan oleh ibu dari ibunya (nenek dari anak) hingga garis keturunan seterusnya jika semua yang tergolong mulai dari ibunya ibu hingga garis keturunan tidak mampu mengasuh maka menjadi kewajiban ayah untuk mengasuh atau mencari pengasuh yang mumpuni/mampu untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

Pengasuh yang dipilih bisa ibu dari ayah (nenek anak) hingga garis keturunan seterusnya. Bisa juga perempuan lain yang memang bisa mampu dalam mengasuh anak. Adapun syarat pengasuh anak adalah baligh dan berakal, mampu mendidik, terpercaya dan berbudi luhur Islam, serta tidak bersuami. Perceraian itu pahit, akan tetapi perceraian akan lebih baik dipilih dari pada kehidupan kehidupan rumah tangga menjadi terpuruk sehingga bisa menyebabkan berbagai kemaksiatan.

Tugas ayah dan ibu berikutnya adalah menanamkan cinta dan kasih sayang kepada anggota keluarganya agar anak-anak yang dididiknya dari sejak hadirnya seorang anak tersebut tidak condong kepada sikap durhaka baik kepada ibu, ayah maupun keduanya ataupun orang lain. Hal ini karena ayah dan ibu adalah orang tua dari anak. Dengan demikian, fenomena yang terjadi seperti berebut hak asuh anak, mengadu pada komisi perlindungan anak maupun LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) peduli anak, seharusnya tidak perlu terjadi. Hal itu justru bisa menimbulkan stress pada anak. Apalagi sampai menghindarkan anak dari pertemuan ayah dan ibu. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila anak-anak menjadi defresi dan membenci salah satu maupun kedua orang tuanya. Inilah saatnya untuk memutus lingkaran setan dari kesalahan pemahaman mengenai hak asuh anak (hadhanah) sesuai syariat islam.<sup>30</sup>

Perceraian yang terjadi pada orang tua seringkali berakhir pada sengketa pengasuhan anak. Dalam prespektif hukum islam pengasuhan anak sering dikenal dengan sebutan kata hadhanah adalah bentuk mashdar dari kata hadhnu ash-shaby, atau mengasuh, memelihara anak. Mengasuh (hadhanah) dalam pengertian ini tidak dimaksudkan dengan menggendongnya dibagian samping dan dada atau lengan. Secara tereminologis, hadhanah adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hukum hadhanah ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya. Inilah yang dimaksud dengan perwalian (wilaya).

---

<sup>30</sup>Hadhanah, (hak asuh anak), di <http://abiyazid.wordpress.com/2008/02/27/hadhanah-hak-asuh-anak>.

Persoalan hadhanah hanya berlaku ketika terjadi perceraian antar suami dan istri. Apabila suatu ikatan pernikahan itu masih berlangsung, maka tanggung jawab, dan kewajiban atas anak menjadi tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Ayah yang berperan sebagai kepala keluarga berkewajiban mencari nafkah dan ibu bertugas sebagai *ummu almadrasah lil aulad*.

Hadhanah (pengasuhan anak) hukumnya wajib karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapat bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.

Meskipun keutamaan ibu dalam memelihara anak tidak secara resmi ditegaskan dalam Al-Qur'an, namun dapat dipahami melalui QS. Lukman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْتًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun[1180]. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu.<sup>31</sup>

Seiring dengan perkembangan pandangan huku islam, maka ketentuan hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan terhadap anak. Diantara penyebab beralihnya kuasa pengasuhan

---

<sup>31</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h.654.

anak dari ibu kepada ayah salah satunya karena dipengaruhi oleh faktor-faktor kepentingan anak yang menghendaki hal tersebut.

Kuasa pengasuhan anak tidak semata-mata karena hal finansial, tetapi hal yang paling mendasar sebagai pertimbangan pengadilan terhadap pihak yang ditunjuk sebagai pemegang kuasa hak asuh yaitu karena faktor perilaku dan moral baik yang dimiliki pemegang atas hak asuh anak tersebut. Batas usia pengasuhan anak dibatasi hingga pencapaian usia mumayyiz. Batas usia mumayyiz yaitu 7 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan. Satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan pemberian hak asuh atas anak tersebut

Terdapat dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

“Dalam Hal Terjadi Perceraian”

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum bereusia 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya:<sup>32</sup>

Setelah batas dari usia mumayyiz, maka anak bebas memilih untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya. Meskipun pada dasarnya kedudukan ibu dan ayah itu sama tanpa adanya perbedaan, tapi keputusan, utamanya tetap berada pada si anak setelah usianya mencapai batas mumayyiz.

---

<sup>32</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*(Jakarta” Akademika Presindo,2004), h.113.

## 2. Hukum Positif

Hak asuh anak akibat perceraian menurut hukum positif memandang perkara hak asuh anak tidak hanya sengketa antara kepentingan pihak penggugat dan tergugat saja melainkan adanya kepentingan anak itu sendiri. Anak dalam hal ini adalah anak kecil yang *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), maka kepentingan anak itu maka kepentingan anak itu dianggap menjadi rana hukum public artinya menjadi kepentingan masyarakat dan negara. Menurut hukum positif mengenai hak asuh anak lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan lebih terjaminnya kesejahteraan hidup anak serta pendidikan keagamaan anak dimasa yang akan datang, hal ini telah sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan pasal 30 (ayat 1) 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **B. Tanggung jawab orang tua terhadap anak**

#### 1. Pengertian tanggung jawab orang tua terhadap anak

##### a. Pengertian tanggung jawab

Adapun definisi tanggung jawab secara haefiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain. Jadi tanggung jawab adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati seseorang. Yaitu menunjukkan bahwa mempunyai sifat kepedulian.



b. Pengertian orang tua

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga.

c. Pengertian anak

Anak adalah pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup anak sebagai penanggung sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus.<sup>33</sup>

2. Hak dan kewajiban orang tua

Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua orang tua. Anak berhak untuk mendapatkan segala kepentingannya untuk menunjang tumbuh kembangnya secara wajar, berhak atas kebutuhan sandang, pangan dan papan secara wajar, berhak untuk mendapatkan bimbingan serta pendidikan yang wajar serta berhak untuk mendapatkan asuhan dari orang tuanya secara baik-baik. Bahwa putusannya perkawinan diantara suami dan istri tidak menggugurkan segala kewajiban orang tua terhadap anaknya, artinya segala hak yang melekat terhadap anak sedikitpun tidak boleh dikurangi karena sebuah perceraian. Orang tua tetap berkewajiban untuk mendidik dan membesarkan anak dengan sebaik-baiknya meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.

Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak menjadi kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, budi pekerti luhur. Pemeliharaan anak juga mempunyai arti yang sebuah tanggung jawab

---

<sup>33</sup>Siska lis sulistiani, *kedudukan hukum anak hasil perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum islam*. V.

orang tua untuk mengawasi, membverikan pelayanan yang semestrinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak dari orang tuanya.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya meskipun rumah tangga telah putus karena perceraian. Kewajiban orang tua meliputi:

1. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
2. Orang tua mewakili anak mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan
3. Sebagaimana diatur dala pasal 41 UU Perkawinan di jelaskan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya pemeliharaannya dan pendidikan yang diperlukan anak, kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun kekuasaan sebagai orang tua dicabut.

Di dalam kompilasi hukum Islam mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak terdapat dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmahyang mejadi sendi dasar dari sausunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 26, sebagai berikut:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.
3. Hak dan kewajiban anak

Anak berhak mendapatkan tanggungan, perlakuan dan perlindungan dari orang tua baik dari segi pendidikan, biaya hidup, ataupun dari ancaman pergaulan. Kewajiban anak adalah menghargai apa yang menjadi keputusan orang tua berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban terhadap anak.

### **C. Terjadinya Perceraian**

#### **1. Pengertian perceraian**

Dalam Islam, Rasulullah . pernah bersabda, “tindakan halal tapi paling dilaknat oleh Allah Swt. adalah perceraian.” ketika pernikahan membuat seseorang atau masing-masing pasangan yang menikah merasa tersiksa secara lahir dan batin

akibat sebuah ikatan bersama, maka dihalalkan bagi mereka untuk melakukan perpisahan di dalam sebuah rumah tangga.

Secara harfiah, definisi perceraian adalah pemutusan terhadap ikatan pernikahan secara Agama dan hukum.<sup>34</sup> Namun di dalam Islam, arti perceraian tidaklah semudah pernikahan. Banyak tahap yang harus dilalui ketika perceraian benar-benar dilakukan. Dalam Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq, yang dipergunakan sebagai Undang-Undang perkawinan, bahwa perceraian hanya akan terjadi ketika ada saksi dan melalui tiga tahap, yaitu talak 1, talak 2, dan kemudian talak 3.<sup>35</sup>

Perceraian menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1994 (pasal 16), terjadi apabila suami dan istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga. Perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan (pasal 18). Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami dan istri atas kuasanya pada pengadilan dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh pengadilan yang bersangkutan. Undang-Undang perkawinan Tahun 1974 bab VIII, pasal 39 Ayat (2) berbunyi:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami dan istri untuk tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”

Menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, perceraian adalah keadaan putusnya suatu ikatan perkawinan.<sup>36</sup> Perceraian merupakan terputusnya keluarga karna salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan atau berpisah sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami dan istri. Apabila seorang suami sangat marah terhadap istrinya sehingga terlontar kata cerai, maka tidak akan terbisik cerai ketika tidak terdapat

---

<sup>34</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ke IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.45.

<sup>35</sup>H.M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Balai Aksara dan Yudistira, 1995), h.15.

<sup>36</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

saksi antara mereka pada saat terucap kata tersebut. Itupun berlaku ketika seorang suami tidak dalam kondisi yang tidak sadar. Misalnya sedang marah dan gelap mata sehingga berkata cerai di luar akal dan niat sehatnya, maka dianggap tidak akan terjadi perceraian.

Kehidupan manusia masa kini yang semakin modern dan maju telah mengikis kesakralan pernikahan. Sehingga perceraian atau pisah ranjang sangat mudah terjadi antara pasangan rumah tangga. Tidak ada usaha yang cukup berarti untuk terus mempertahankan mahligai rumah tangga yang telah dibangun butuh nasihat yang sempurna. Egosentris yang menyelimuti individu-individu modern telah menjadikan nilai agamis tidak lagi melebihi nilai duniawi

Bentuk dan tahap perceraian dan akan harus dilalui seseorang, diantaranya:

- a. Perceraian Emosional ialah berawal dengan persoalan dari perkawinan yang mulai memburuk. Bentuk perceraian ialah awal dari tahapan yang sangat berpengaruh dimana struktur perkawinan menjadi runtuh dan motivasi untuk bercerai mulai muncul. perilaku-perilaku yang muncul diantaranya adalah konflik, terhambatnya komunikasi, hilangnya kepercayaan, dan timbulnya kebencian.
- b. Perceraian ilegal, memerlukan lembaga pengaduan untuk memutuskan ikatan perkawinan. pasangan biasanya mengalami kelegaan, jika perceraian telah diputuskan secara legal dimana berbagai ekspresi emosionalnya akan bermunculan pada tahap-tahap ini.
- c. Perceraian Ekonomi menunjukkan pada tahap ini dimana pasangan telah memutuskan untuk membagi kekayaan dan harta mereka masing-masing. pada tahap ini seringkali dibutuhkan seorang penengah karena biasanya kedua pasangan menunjukka reaksi kebencian, kemarahan, dan permusuhan berkaitan dengan pembagian harta kekayaan.

- d. Perceraian karena orang tua, merupakan tahapan yang ke empat yang berkenang dengan berbagai persoalan anak. Kekhawatiran dan perhatian terhadap dampak perceraian pada anak seringkali dalam tahapan tersebut.
- e. Perceraian komunitas merupakan bahwa status individu dalam hubungan sosial menjadi berubah. Banyak individu merasa bahwa mereka telah terisolasi dan kesepian.
- f. Perceraian pasikis berkaitan dengan mendapatkan kembali otonomi individual. Perubahan dari situasi yang berpasangan menjadi individu yang sendirian, membutuhkan penyesuain kembali peran-peran dan penyesuaian mental.<sup>37</sup>

Suatu reaksi pertama yang dimunculkan oleh setiap individu saat menghadapi perceraian umumnya adalah reaksi-reaksi yang bersifat emosional. Reaksi tersebut tampak dengan wujud penyangkalan terhadap kenyataan perceraian dan kemarahan yang memuncak pada depresi seseorang. individu pada akhirnya setuju untuk bercerai hanya melihat ketika melihat kenyataan bahwa perceraian merupakan keputusan yang terbaik dari pada mempertahankan perkawinan yang sudah tidak harmonis.<sup>38</sup>

## 2. Jenis-Jenis Perceraian

Adapun jenis-jenis perceraian diantaranya:

### a. Cerai hidup

Perceraian adalah terpisahnya pasangan suami dan istri atau telah berakhirnya suatu ikatan perkawinan yang diakui oleh hukum atau ilegal. Emery mendefinisikan perceraian hidup adalah berpisahnya pasangan suami

---

<sup>37</sup>Fatchiah E Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), h. 20.

<sup>38</sup>Hurlock, E. B. *Psikologi Perkembangan, suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta:Erlangga, 1994), h.34.

dan istri atau berakhirnya perkawinan karena tidak tercapainya kata kesepakatan mengenai masalah hidup. Percerain dilakukan karena tidak ada lagi jalan lain yang tempuh untuk menyelamatkan perkawinan mereka.<sup>39</sup>

b. Cerai mati

Cerai mati merupakan meninggalnya dari salah satu pasangan hidup dan sebagai pihak yang di tinggal harus sendiri dalam menjalani suatu kehidupan. Salah satu pengalaman hidup yang paling menyakitkan yang mungkin dihadapi oleh seseorang adalah berakhirnya hubungan karena meninggalnya salah satu pihak yang dicintainya.

Sebuah pendapat menyatakan bahwa meninggalnya pasangan hidup bagi seorang wanita akan terasa lebih menyakitkan dibanding laki-laki, karena itu seseorang laki-laki yang ditinggal mati oleh pasangan hidup cenderung lebih cepat dapat melupakan atau menyelesaikan masalah tersebut dan memilih untuk menikah kembali. Sebaliknya para wanita yang ditinggal mati suaminya biasanya akan memiliki masalah yang lebih kompleks. mereka harus memikirkan sumber masalah, sumber keuangan bagi kehidupan dan juga untuk anak-anaknya.<sup>40</sup>

3. Penyebab-penyebab terjadinya perceraian

Pernikahan harmonis sedianya merupakan dambaan setiap pasangan. Akan tetapi saat tak ada lagi kecocokan, seringkali perceraian dianggap sebagai jalan terbaik dan akhir dari dari segalanya. menjalani kehidupan perkawinan tentu saja bukan suatu perkara yang sangat mudah. pasalnya dalam pernikahan, akan ada banyak cobaan dan masalah yang melanda. ketika tidak mampu melewati masalah,

---

<sup>39</sup>Emmery, E.R. *Maryage, Divorce, Chlidenen Adjusment, 2nd Edition*, (New York: Prentice Hall Interenational,1999), h.38.

<sup>40</sup>Benaim, Mariage And Family Interaction, 5th Edition (Iiinoice Thhe Dorsey Press,1979), T.H.

seringkali jalan perpisahan atau jalan yang terakhir. Menurut Fauzi alasan-alasan untuk bercerai adalah:

a. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Ketidakharmonisan merupakan alasan yang kerap dikemukakan bagi pasangan yang hendak bercerai. ketidak harmonisan disebabkan oleh berbagai hal antara lain, ketidak cocokan pandangan, krisis akhlak, perbedaan pendapat yang sulit disatukan dan lain-lain

b. Krisis moral dan akhlak

Percerain juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, misalnya kelalaian tanggung jawab baik suami maupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan, dan keburukan prilaku lainnya, misalnya mabuk-mabukkan, terlibat tindakan kriminal, bahkan utang piutang.

c. Perzinahan

Terjadinya perzinahan yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik suami maupun istri merupakan penyebab perceraian. Di dalam hukum perkawinan Indonesia, perzinahan dimaksudkan kedalam salah satu pasalnya yang dapat mengakibatkan berakhirnya pada perceraian.

d. Pernikahan tanpa cinta

Alasan lain yang kerap dikemukakan baik oleh suami atau istri untuk mengakhiri suatu perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi dengan cinta.<sup>41</sup>

Selain itu, perceraian merupakan proses sulit bagi pasangan. Akibat bercerai, pasangan suami istri bisa tersakiti secara fisik maupun emosional.

Penyebab perceraian yaitu:

---

<sup>41</sup>Fauzi, D.A. Perceraian Siapa Taku, (Jakarta:Restu Agung, 2006), T.h.



a. Perbedaan prinsip

Alasan perbedaan prinsip sering digunakan oleh para pasangan ketika bercerai. Masalah prinsip ini biasanya berkaitan dengan agama, krier, anak, dan perbedaan lainnya.

b. Kekerasan

Masalah kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi salah satu penyebab pasangan bercerai. Kekerasan fisik merupakan faktor utama kenapa istri atau suami menggugat cerai pasangannya.

c. Perselingkuhan

Apalagi kalau perselingkuhan itu sudah menyangkut aktivitas seksual. Alasan inipun sering dipakai untuk menceraikan pasangan.

d. Keuangan

Uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tetapi kalau tidak ada uang seseorang bisa lari dari pasangannya. Masalah finansial ini tak jarang di temukan sebagai pemicu perceraian.

e. Kecanduan

Banyak orang yang kerap merokok, mabuk, sampai minum obat-obatan terlarang. kalau sudah kecanduan, tidak jarang mereka akan diceraikan oleh pasangannya.

f. Komunikasi

Terutama jika salah satu pasangan tinggal jauh dari rumah karena alasan pekerjaan. Buruknya komunikanyapun bisa membuat sebuah rumah tangga bisa hancur.

g. Seks

Seks jelas penting dalam hidup pernikahan. Tanpa seks, semuanya akan terasa hambar. kebanyakan orang akhirnya memutuskan untuk cerai.<sup>42</sup>

4. Akibat hukum perceraian

Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan Hukum Keluarga maupun dalam Hukum Kebendaan serta Hukum Perjanjian.<sup>43</sup> Akibat pokok dari perceraian adalah suami dan istri, kemudian akan hidup sendiri-sendiri secara terpisah.

Dalam pemutusan perkawinan dengan melalui lembaga perceraian, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami dan istri yang bercerai tersebut dan juga terhadap anak harta dan perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh san suami dan istri tersebut selama perkawinan. Adapun putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, akan menimbulkan berbagai kewajiban yang dibebankan oleh suami-istri masing-masing terhadapnya. Seperti yang terdapat di dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Pengadilan memberikan keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang diperlukan. Bilamana bapak dalam kenyataanya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

---

<sup>42</sup>Gunarsa, S. D. *Psikologi untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Agung Mulia, 1999), h. 15.

<sup>43</sup>Martiman Protjohamitjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), h. 46.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penhidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Oleh karena itu, dampak atau akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian telah jelas diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

#### 1) Terhadap hubungan suami-istri

Meskipun diantar suami-istri yang telah menjalin perjanjian suci namun tidak menutup kemungkinan bagi suami-istri tersebut merupakn mengalami pertikaian yang menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga. hubungan suami-istri terputus jika terjadi putusnya hubungan perkawinan. seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa iddanya habis atau berakhir, yakni selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari atau 130 (seratus tiga puluh) hari pasal 39 Ayat (1) huruf (a).Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu bagi yang masih yang datang bulan ditetapakn 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan di tetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 39 Ayat (1)huruf (b) serta ketika apabila pada saat istrinya sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat kawin lagi adalah ampai dengan ia melahirkan anaknya.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah si-istri sedang hamil atau tidak. seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya dan kan menikah lagi dengan wanita lain ia boleh langsung menikah, karena laki-laki tidak mempunyai masa iddah.

#### 2) Terhadap Anak

Menurut Undang-Undanng Perkawinan meskipun telah perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah

untuk anak-anaknya, yaitu belanja uang belanja untuk memelihara dan sebuah keperluan pendidikan anak-anaknya tersebut, sesuai kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anaknya.

### 3) Terhadap harta bersama

Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta dan perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain-lainnya. Berdasarkan pasal 37 dan penjelasan resmi atas

pasal tersebut undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian. Adapun yang dimaksud dalam pasal ini dengan kata”, tiada lain dari pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian.<sup>44</sup> Maka sesuai dengan cara pembagian, Undang-Undang menyerahkan kepada “Hukum yang hidup” dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dalam rumah tangga itu berada. Apabila kita kembali pada penjelasan pasal 37 maka Undang-Undang memberi jalan pembagian:

---

<sup>44</sup>Paulus Hadisuprpto, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Surabaya: Media Pustaka, 2013), h.22.

- a. Dilakukan berdasarkan hukum agama jika jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
- b. Aturan pembagiannya dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat lingkungan yang bersangkutan;
- c. Atau hukum-hukum lainnya;
- d. Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada di tangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau istri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka bisa digugat melalui Pengadilan Negeri di tempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan.
- e. Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami-istri yang beragama islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-istri non-Islam menurut Hukum perdata.<sup>45</sup>

#### 4) Terhadap Nafkah

Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si-istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari. Akan tetapi setelah sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya, bahkan sesudah masa iddah, bekas istri itu harus keluar dari rumahnya suaminya andaikata ia masih hidup di rumah yang disekakan oleh suaminya. Jadi baik wanita yang dalam masa iddah ataupun masa iddahnya telah habis asal dalam perceraian ia bukan berada dipihak yang salah, maka ia berhak menerima atas biaya

---

<sup>45</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi* (Jakarta: Bumi Aksara, April 1999), Hazairin, *Hukumkekeluargaan Indonesia*(Jakarta: Tintamas, 1961), h.189.

penghidupan. Ketentuan itu bisa dengan damai atas persetujuan bekas suami begitupun mengenai jumlah biaya hidupnya ataupun dapat pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan sukarela untuk memberi biaya hidup tersebut.

#### 5. Dampak Perceraian Terhadap Anak

Perceraian bagi anak adalah tanda kematian keutuhan keluarganya, rasanya separuh diri anak telah hilang, hidup tidak akan sama lagi setelah orang tua mereka bercerai dan mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam. Contohnya, anak harus memendam rasa rindu yang mendalam terhadap ayah/ibunya yang tiba-tiba tidak tinggal bersamanya.

Dalam sosiologi, terdapat teori pertukaran yang melihat perkawinan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghagaan dan kehilangan yang terjadi diantara sepasang suami isteri. Perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama, sementara latar belakang sosial budaya, keinginan serta kebutuhan mereka berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama. Adapun dampak akibat perceraian terhadap anak yaitu:

- 1) Traumatik, setiap perubahan akan mengakibatkan stres pada orang yang mengalami perubahan tersebut. Sebuah keluarga melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, seperti pindah rumah atau lahirnya seorang bayi dan kekacauan kecil lainnya, namun keretakan yang terjadi pada keluarga dapat menyebabkan luka-luka emosional yang mendalam dan butuh waktu bertahun-tahun untuk penyembuhan.

Dampak traumatik dari perceraian biasanya lebih besar daripada dampak kematian, karena sebelum dan sesudah perceraian sudah timbul rasa sakit dan tekanan emosional, serta mengakibatkan cela sosial. Stres akibat

perpisahan dan perceraian yang terjadi menampakkan laki-laki maupun perempuan dalam resiko kesulitan fisik maupun psikis. Laki-laki dan perempuan yang bercerai memiliki tingkat kemungkinan yang lebih tinggi mengalami gangguan psikietris, masuk rumah sakit jiwa, depresi klinis, alkoholisme dan masalah psikosomatis, seperti gangguan tidur. Dampak perceraian sangat berpengaruh pada anak-anak. Pada umumnya anak yang orangtuanya bercerai, merasa sangat terluka karena loyalitas yang harus dibagi dan mereka umumnya menderita kecemasan karena faktor ketidakpastian yang mengakibatkan terjadinya perceraian dalam keluarga. Ketidak pastian ini khususnya akan lebih serius apabila masalah keselamatan dan pemeliharaan anak menjadi bahan rebutan antara ayah dan ibu, sehingga anak akan mondar-mandir antara rumah ayah dan ibu.

## 2) Perubahan peran dan status

Efek yang paling jelas akan mengubah peranan dan status seseorang yaitu dari isteri menjadi janda dan suami menjadi duda dan hidup sendiri, serta menyebabkan pengujian ulang terhadap identitas mereka. Baik pria maupun wanita yang bercerai merasa statusnya atau identitasnya tidak menentu, terutama bagi pihak wanita yang belum bercerai identitasnya sangat tergantung pada suami. Hal ini karena orang-orang yang bercerai seringkali menilai kegagalan perkawinan mereka sebagai kekebalan personal. Mereka mencoba untuk mengintegrasikan kegagalan perkawinan dengan devinisi personal mereka tentang maskulinitas ataupun feminitas, kemampuan mereka dalam mencintai seseorang, dan aspirasi mereka untuk menjalankan peran sebagai suami, istri, bapak, ibu daripada anak-anak mereka. Setelah bercerai baik pria maupun wanita akan terhenti dalam melakukan hubungan seksual secara rutin. Bagi pria biasanya dapat

menyelesaikan masalahnya dengan menjalin hubungan seksual dengan wanita lain. Sedangkan janda yang mempunyai anak sering kesulitan dalam menyelesaikan masalah seksualnya.

Orang-orang yang bercerai umumnya kurang merasa puas dengan kehidupan mereka dibandingkan dengan orang-orang yang menikah, yang belum menikah, atau bahkan janda atau duda ditinggal mati. Perasaan tidak puas ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya, orang-orang yang bercerai seringkali menilai gagal dalam perkawinan.

### 3) Sulitnya penyesuaian diri

Kehilangan pasangan karena kematian maupun perceraian menimbulkan masalah bagi pasangan itu sendiri. Hal ini lebih menyulitkan khususnya bagi wanita. Wanita yang dicerai oleh suaminya akan mengalami kesepian yang mendalam. Bagi wanita yang bercerai, masalah sosial lebih sulit diatasi dibandingkan bagi pria yang bercerai. Karena wanita yang dicerai cenderung dikucilkan dari kegiatan sosial dan yang lebih buruk seringkali ditinggalkan oleh teman-teman lamanya. Namun jika pria yang dicerai akan mengalami kekacauan pola hidup.

Beberapa individu tidak dapat menyesuaikan diri dengan perceraian individu itu bereaksi terhadap perceraianya dengan mengalami depresi dan kesedihan yang mendalam, bahkan dalam beberapa kasus, sampai pada taraf bunuh diri. Bagaimanapun tidak semua pasangan yang bercerai mengakhiri dengan permusuhan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>M. Enoch Makrum, *Anak, Keluarga Dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), h. 15.



## **D. Studi kasus**

### **1. Pengertian studi kasus**

Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam penelitian ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang sesuatu yang terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.

Pendapat lain menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu strategi riset, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Strategi ini dapat menyertakan bukti kuantitatif yang bersandar pada berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya dari proposisi teoritis. Studi kasus dapat menggunakan bukti baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian dengan subjek tunggal memberikan kerangka kerja statistik untuk membuat infrensi dari data studi kasus kuantitatif.

Seperti halnya pada tujuan penelitian lain pada umumnya, pada dasarnya peneliti yang menggunakan metode penelitian studi kasus bertujuan untuk memahami objek yang ditelitinya. Meskipun demikian, berbeda dengan penelitian yang lain, penelitian studi kasus bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami objek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu ‘kasus’. Berkaitan dengan hal tersebut, menyatakan bahwa tujuan penggunaan penelitian studi kasus adalah tidak sekedar untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi. Dengan kata lain, penelitian studi kasus bukan sekedar menjawab pertanyaan penelitian tentang ‘apa’ objek yang diteliti,

tetapi lebih menyeluruh dan komprehensif lagi adalah ‘bagaimana’ dan ‘mengapa’ objek tersebut terjadi dan terbentuk sebagai dan dapat dipandang sebagai suatu kasus. Sementara itu, strategi atau metode penelitian lain cenderung menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana, berapa, dan seberapa besar.

## 2. Macam-macam kasus

Ada dua macam perceraian sesuai dengan Undang-Undang perkawinan No.1/1974 pasal 39-41 yaitu :

### a. Cerai gugat

Cerai gugat adalah terputusnya ikatan suami dan isteri dimana dalam hal ini sang isteri yang membuat suatu keputusan atau melayangkan gugatan cerai kepada sang suami.

### b. Cerai talak

cerai talak adalah putusnya suatu ikatan suami dan isteri dimana dalam hal ini yang membuat suatu keputusan atau yang memberikan adalah suami memberikan talak pada sang isteri.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. *Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research* kualitatif dalam mengumpulkan data dan informasi yang butuhkan bersumber dari hasil wawancara pihak-pihak yang terkait dalam proses yang akan diteliti tentang tunjauan yuridis tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian, dengan penelitian lapangan yang dilakukan ini menggunakan beberapa metode seperti wawancara, observasi serta menemukan fakta-fakta di lapangan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data atau sumber data dari Desa Waji Kecamatan Tellusiattingnge dan sumber data lainnya dari beberapa buku dan literatur.

##### **2. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Desa Waji Kecamatan Tellusiattingnge

#### **B. *Pendekatan penelitian***

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan yuridis, yaitu penulis berpedoman pada dalil-dalil nash Al-Qur'an dan hadits Nabi saw. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Terutama mengenai perkawinan, perceraian, perwalian dan harta benda perkawinan dengan jalan mencari penjelasan dari peraturan yang berlaku guna mendukung legalitas dari persoalan yang dibahas.

- b. Pendekatan sosiologis, yaitu untuk mengetahui bagaimana bagaimana tanggung jawab orang tua setelah perceraian di tengah-tengah kehidupan masyarakat dilihat dari sudut struktur sosialnya.
- c. Pendekatan syar'i, yaitu membahas masalah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan atau aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam, yaitu penulis berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (*KHI*).

### **C. Sumber data**

Data merupakan sekumpulan hasil pengamatan atau pengukuran yang diperoleh dari sampel dan penelitian ini nantinya maka data yang digunakan ada dua sebagaimana yang dikemukakan oleh Arif Tiro yaitu:

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama dan utama yang dilakukan secara langsung melalui *field reseach* oleh penulis dari responden di lapangan meliputi wawancara atau observasi dengan informan penelitian agar mendapat keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh.<sup>47</sup>

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelahan literatur-literatur peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas.

#### **c. Data tersier**

Data tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupu penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, misalnya kamus-kamus dan ensiklopedia seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (*kbbi*) dan literature yang berkaitan dengan judul dalam penelitian.

---

<sup>47</sup>Arif Tiro, *Dasar-Dasar Statistic*. Edisi Revisi (Cet 1:UNM Makassar, 1999), h, 110.

#### **D. Metode pengumpulan data**

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>48</sup> untuk memperoleh informasi dan data sebagai bahan penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para ahli yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis dan kemudian membandingkan serta menganalisis untuk memecahkan masalah yang diangkat.
- b. Penelitian lapangan (*faield research*), adalah metode pengumpulan data yang dilakukan pada lokasi (objek penelitian) secara langsung, reset lapangan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  1. Wawancara, adalah metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan seperti para janda atau duda dan lainnya yang termasuk dalam objek penelitian, guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian. Metode ini digunakan untuk mengetahui informasi secara langsung dan mendalam terhadap objek yang diteliti, wawancara yang dilaksanakan adalah dengan mereka yang dipandang dapat memberikan data-data yang dibutuhkan. Sutrisno Hadi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang

---

<sup>48</sup>Suhartini Atikunto, *Manajemen Pendidikan*, (Cet V; Jakarta: Kineka Cipta, 2000), h.134.

atau lebih dalam bentuk tatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>49</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa wawancara itu lebih ditekankan dalam bentuk komunikasi secara langsung (tatap muka) meskipun wawancara itu bisa dilakukan tanpa tatap muka. Dalam hal ini penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan cara terstruktur dan non struktur.

2. Observasi (pengamatan), adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti guna memberikan gambaran yang sebenarnya terhadap permasalahan yang diteliti. Observasi ini dilakukan pada beberapa kasus yang sesuai dengan penulis teliti di Desa Waji Kecamatan Tellusiattingnge.<sup>50</sup>
3. Objek dan tempat penelitian yaitu objek dan penelitian ini adalah tinjauan yuridis tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian. Adapun tempat penelitian dilakukan di Desa Waji Kecamatan Tellusiattingnge.

#### **E. Instrumen penelitian**

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena sosial yang diamati. Adapun instrumen peneliti yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara, yaitu alat yang digunakan dalam wawancara yang dapat dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa pertanyaan.

---

<sup>49</sup>Sutrisno Hadi, *Metologi Research* (Jakarta: Universitas Gajah Mada, 1986), h.45.

<sup>50</sup>Sutrisno Hadi, *Metologi Research*, h. 231.

- b. Alat tulis atau buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
- c. Alat perekam, yaitu alat yang digunakan untuk menyimpan perkataan dari informan yang dianggap penting.

#### **F. Teknik pengolahan dan analisi data**

##### **a. Pengolahan data**

Dalam pengolahan data penelitian ini ada dua langkah yang harus dilakukan yaitu:

##### **1. Editing**

Merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman atau catatan data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Kegiatan pemeriksaan rekaman atau catatan merupakan kegiatan penting dalam pengolahan data.

##### **2. Verifikasi**

Merupakan peninjauan kembali mengenai kegiatan yang telah dijalankan sebelumnya sehingga hasilnya benar-benar dapat dipercaya.<sup>51</sup> Tahap ini merupakan tahap yang dilalui dalam proses penelitian sebelum proses analisis dijalankan.

##### **b. Analisis data**

Analisis data dilakukan terhadap data yang diperoleh untuk membuktikan kebenaran data pengalaman empiris yang dimiliki seseorang tanpa mengurangi keobjektifan dan kebenaran data yang diungkapkan. Data yang dikumpulkan dan dianalisis dengan teknik analisis deduktif yaitu data yang ditemukan di lapangan dianalisis dari data yang bersifat umum diuraikan dan diperoleh pengertian yang bersifat khusus.

---

<sup>51</sup>Muhammad Teguh, *Metologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi* (Edisi 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 137-183.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, merujuk pada buku pedoman penulisan karya ilmiah, makalah, skripsi, tesis, disertasi (edisi revisi 1, 2013) yang diterbitkan Alauddin Pres.<sup>52</sup> tanpa mengabaikan beberapa literature dan buku-buku metodologi lainnya. Kemudian dari sini penulis memilih beberapa metode relevan yakni metode penentuan lokasi dan jenis penelitian, pendekatan penelitian, instrumen penelitian, teknik pengolahan dan analisis data. Untuk menguji keabsahan data dari berbagai sumber, baik observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

Analisis data adalah pengorganisasian dan mengurutkan dalam pola, kategori dan uraian sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data tersebut.

#### **G. Keabsahan data**

Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai berikut:

##### **a. Meningkatkan ketekunan**

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan salah atau tidak sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati dan meningkatkan kredibilitas data.

---

<sup>52</sup>A. Qadir Qassing Ht Dan Wahyudin Halim dalam Tim Penulis Karya Ilmiah Uin Alauddin, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian* (Edisi Revisi 1;Makassar: Alauddin Press, 2013), H.10-22.



b. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud bahan referensi disini adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah di temukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara yang perlu didukung.

## **BAB IV**

### **TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DAN AKIBAT HUKUM BAGI ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN BERDASARKAN TINJAUAN YURIDIS**

#### **A. Gambaran Umum Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone**

##### **1. Kondisi geografis**

###### **a. Letak, luas dan batas Desa Waji**

Desa waji terletak di wilayah Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone, jarak ibu kota kecamatan  $\pm 20$  km dan jarak dari ibu kota kabupaten  $\pm 25$  km. Jika menggunakan kendaraan bermotor maka jarak tempuh ke kota kecamatan  $\pm 40$  menit, dan  $\pm 30$  menit menuju ibu kota kabupaten.<sup>53</sup>

Motto, Visi

Siap berjuang demi Desa Waji yang lebih baik, terwujudnya masyarakat Desa Waji yang cerdas, religius, sehat dan sejahtera,

Misi

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelayanan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur sarana prasarana di segala bidang
5. Meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Pemerintah Kabupaten Bone, *buku saku sistem database desa dan kelurahan desa*. (Bone:Desa Waji, 2017) h. 35

<sup>54</sup>Pemerintah Kabupaten Bone, *buku saku sistem database desa dan kelurahan desa*. (Bone:Desa Waji, 2017) h. 36

Luas wilayah desa waji sekitar 1.532 ha atau 15,32 km<sup>2</sup>.<sup>55</sup> Desa waji terletak di daerah persawahan yang memiliki potensi dalam bidang pertanian, peternakan dan perdagangan. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah barat : berbatasan desa lanca kecamatan tellusiattinge;
2. Sebelah selatan : berbatasan kelurahan tokaseng kecamatan tellusiattinge;
3. Sebelah utara : berbatasan desa ajjalireng kecamatan tellusiattinge;
4. Sebelah timur : berbatasan desa watu kecamatan cenrana;

Desa waji memiliki 6 Dusun dan 18 RT dan masing-masing memiliki sejarah sehingga dinamakan dusun tersebut, desa waji diberikan nama waji karena salah seorang yang memperjuangkan wilayah tersebut macca, magetteng nennia malempu, dan dia adalah sosok orang kaya yang bernama lawaji, yaitu:

1. Dusun Pattunungeng, terdiri 3 RT, sebelum agama Islam masuk di Kerajaan Bone masyarakat Bone mayoritas beragama budha, dan di dusun ini salah satunya tempat pembakaran ( pattununge ) orang yang beragama budha.
2. Dusun Mauleng, terdiri 3 RT, dinamakan dusun Mauleng karena salah seorang yang memperjuangkan Desa Waji adalah Lawaji dan istri dari Mauleng.
3. Dusun Lallere'e, terdiri 3 RT, dinamakan Dusun Lallere'e karena terdapat bunga yang begitu indah, bentuk bunga ini mallere-lerere.

---

<sup>55</sup>Pemerintah Kabupaten Bone, *buku saku sistem database desa dan kelurahan desa*. (Bone:Desa Waji, 2017) h. 1.

4. Dusun Kung, terdiri 3 RT, dinamakan dusun Kung karena artinya watak atau pusat para raja, pemimpin kerajaan.
5. Dusun Takku, terdiri 3 RT, Takku artinya berhenti, dinamakan dusun Takku karena dulu seorang anak raja, putri dari kerajaan di bawah lari oleh pemudah dan di dusun inilah anak tersebut berhenti.
6. Dusun Kacumpureng, terdiri 3 rt, dusun Kacumpuren artinya berbaris lurus, dulu di wilayah tersebut terdapat beberapa rumah yang bebaris lurus.<sup>56</sup>

b. Struktur organisasi

struktur pemerintahan di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone. Di pimpin oleh kepala Desa. Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan Kepala Urusan (kaur).

Adapun susunan pemerintahan Desa Waji tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Distribusi Data Berdasarkan Struktur Pemerintahan Desa Waji  
Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone

No	Jabatan	Nama
1	Kepala desa	Dra.hj.syamsiar, m.si
2	Sekertaris desa	Arnida, s.pd
3	kasi Pemerintahan	Amir jamad
4	Kasi kesejahteraan dan pelayana	Akbar
5	Kaur. Keuangan	Roslan
6	Kaur. Umum	a.Nurfaidah

*Sumber data, Data Sekunder: Dokumen Kantor Desa Waji.*<sup>57</sup>

<sup>56</sup>Arnida (37 tahun), Sekertaris Desa, *wawancara*, Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone. 3 Desember 2018

<sup>57</sup>Pemerintah Kabupaten Bone, *Buku Saku Sistem Database Desa dan Kelurahan Desa*. (Bone:Desa Waji, 2017) h.37.

Desa waji dengan jumlah penduduk 3.554 jiwa yang terdiri dari:

- a. Jumlah penduduk laki-laki : 1.682 jiwa
- b. Jumlah penduduk perempuan : 1.872 jiwa.
- c. Jumlah kk : 764 kk
- d. Jumlah keluarga miskin : 148 kk
- e. Jumlah rumah tangga : 557 rumah.<sup>58</sup>

Gambar Desa Waji



*Sumber data, Data Sekunder: Dokumen Kantor Desa Waji.*<sup>59</sup>

## 2. Perekonomian desa waji

Sumber mata pecaharian pokok masyarakat Desa Waji yaitu terdiri dari:

---

<sup>58</sup>Pemerintah Kabupaten Bone, *buku saku sistem database desa dan kelurahan desa*. (Bone:Desa Waji, 2017) h.31.

<sup>59</sup>Pemerintah Kabupaten Bone, *buku saku sistem database desa dan kelurahan desa*. (Bone:Desa Waji, 2017) h.1.

a. Sektor pertanian

Memiliki kekayaan alam yang cukup memadai terutama disektor pertanian, seperti padi, jagung, ubi, dan lain-lainnya. Usaha pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat antara lain melalui intensifikasi pertanian secara massal kepada para petani. 75% masyarakat Desa Waji pencahariannya adalah petani, dikarenakan Desa Waji memiliki cukup luas lahan pertanian dan perkebunan. Kurang lebih ada 200 hektar persawahan dan luas hektarnya bervariasi sedangkan perkebunan kurang lebih 150 hektar luasnyapun bervariasi.

Pada setiap keluarga yang bermata pencaharian bertani, maka seluruh anggota keluarganya ikut menjadi pelaksana dalam pertanian baik di kebun, di ladang maupun di sawah. Tentu saja pekerjaan yang berat dilaksanakan oleh kaum laki-laki, membajak, membersihkan hutang, mencangkul, membajak, menabur benih, mencabut benih, dan seterusnya sampai panen. Menuai padi dan memetik hasil kebun dikerjakan bersama-sama baik laki-laki maupun kaum perempuan, demikian pula anak-anak tidak ketinggalan.

Dalam penggarapan dan pengelolaan sawah, dulu masih dilakukan kerja sama dan tolong menolong atau disebut mappalere/madakkala, karena disebabkan mereka masih menggunakan alat atau tenaga tradisional (kekuatan binatang: sapi dan kerbau), namun seiring dengan perkembangan zaman masyarakat sudah bisa membajak sawahnya masing-masing, dengan menggunakan mesin traktor tanpa bantuan orang lain. Demikian pula dalam hal panen, mereka dulu masih menggunakan cara-cara manual sehingga adakalanya memanggil warga lain untuk membantu panen di sawahnya (mapparingala). Bagi mereka yang dibantu

berkewajiban menyediakan makanan untuk dimakan bersama-sama di rumah atau diantar kesawah apabila sawah itu jauh dari rumah.

Pada waktu padi mulai menguning tenaga anak-anak dan prempuan mulai melakukan perannya menjaga padi dengan mengusir burung-burung pipit yang memakan buah padi pada siang hari. Mereka dibuatkan dengao-dengao atau disebut sebagai pajo-pajo. Dari atas dengao-dengao inilah dipasang tali yang telah digantungi bunyi-bunyian yang letaknya di tengah-tengah sawah, sehingga kalau di tarik bunyi-bunyianpun terdengar dan akan mengusir burung pipit tersebut.

Setelah tiba hasilnya akan dipetik, semua tenaga dikerahkan untuk menuai padi yang telah siap dipanen, para penuei padi disebut paringala, dilakukan secara bersama-sama baik laki-laki maupun prempuan, dan yang mengangkut padi adalah laki-laki. Dalam panen ada namanya sistem upah, makin banyak kita kerjakan makin banyak upah yang kita dapatkan, upan tidak berupa uang melainkan hanya dalam bentuk padi saja.

Sistem pemilikan sawah ada berapa macam antara lain:

1. Sawah milik pribadi atau keluarga, diperoleh dari pusaka, warisan atau dibuka sendiri, akan tetapi kepemilikan sawah umumnya diperoleh karena pusaka.
2. Sawah diperoleh karena dibeli
3. Sawah milik diperoleh karena digadai. Hak pemilik sawah ini tentu terbatas, karena mengikuti perjanjian yang umunya tidak tertulis.

b. Sektor peternakan

Dilihat dari sektor peternak. Sekitar 10% masyarakat di Desa Waji sebagai peternak, masyarakat Desa Waji memiliki macam-macam hewan ternak. Namun kebanyakan di Desa Waji beternak sapi, kambing, bebek dan ayam. Biasanya hasil ternak mereka di bawah ke ibu kota untuk diperjual belikan dikarenakan harga hasil ternak mereka lumayan mahal dibandingkan dijual di tetangga desa maupun di kampung.

Namun disisi lain ada program desa yang ingin dikembangkan yaitu peternakan sapi dikarenakan ternak sapi di desa memiliki daging yang baik. Sehingga pemerintah Desa Waji menyewa dokter hewan. Pemerintah Desa Waji sangat serius dalam hal ini tidak hanya untuk mensejahterakan masyarakat Desa Waji. Kepala Desa Waji akan mensupport penuh sektor perdagangan terutama dipeternak sapi agar supaya nantinya daging-daging sapi disini di import luar negeri.

c. Sektor perdangan

Sekitar 10% masyarakat Desa Waji memiliki pekerjaan sebagai pedagang, setara dengan sektor peternak. Masyarakat desa berdagang baik dari buah-buahan maupun dari sektor peternakan. Adapun yang sering diperdagangkan seperti padi atau beras, gula merah, buah-buahan dan lain sebagainya.

d. Kepegawaian

Masyarakat Desa Waji juga ada yang berfotensi sebagai pegawai namun tak sebanyak dari sektor pertanian, peternak dan perdagangan. Hanya ada 5% yang berefotensi sebagai pegawai.



Berdasarkan data di atas, maka dapat diperoleh suatu gambaran bahwa luas tanah untuk penggunaan tanah sawah teknis menempati area yang paling tinggi dari beberapa penggunaan tanah lainnya. Oleh karena itu dapat diyakini bahwa daerah tersebut pantas dijadikan sebagai upaya pengembangan area pertanian dan juga perkebunan. Hal ini diperkuat dengan kebiasaan masyarakat bercocok tanam dan berkebun secara turun temurun.

Sedangkan keadaan iklim di wilayah Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone adalah iklim tropis dengan suhu maksimum 30 derajat celcius, curah hujan rata-rata 90 mm/tahun.

Mengenai jenis objek tanaman yang terdapat diobjek penulisan pada umumnya terdiri atas tanah yang cocok untuk tanah penelitian, di samping itu tanah kering yang cocok dengan perkebunan. Dengan kondisi tanah seperti itu, maka wajar masyarakat memilih menjadi seorang petani secara umum untuk kelangsungan hidup sehari-harinya, walaupun ada sebagian diantara anggota masyarakat yang berkebun sebagai pekerjaan sampingan.

Desa waji mempunyai iklim rata-rata tidak berbedah jauh dengan iklim daerah yang lainnya yang ada di wilayah sulawesi selatan pada umumnya, yakni beriklim sub tropis atau beriklim sedang dan biasanya terdapat dua jenis musim yaitu musim hujan dan musim kemarau sesuai dengan predaranya selama satu tahun dengan princiian sebagi berikut:

1. Musin hujan dari bulan februari sampai september dan waktu inilah masyarkat petani mulai berduyung-duyung mempersiapkan bibit untuk bertani.

2. Musim kemarau dari bulan oktober sampai bulan januari petani menanam palajiwa antara lain: jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi, dan lain-lain. Pengaruh iklim ini sangat menentukan kehidupan dalam masyarakat, misalnya para petani memanfaatkan menanam padi pada musim hujan. Namun akhir-akhir ini, musim-musim hujan itu tidak lagi mengenal pola waktu tersebut.

### 3. Keadaan sosialnya

Dalam kehidupan masyarakat Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone, di samping sistem kekeluargaan mereka masih kuat, juga sangat memperhatikan garis keturunan dari pihak bapaknya sebagaimana masyarakat bugis pada umumnya, demikian pula pada garis keturunan dari pihak ibunya.

Masyarakat Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone secara garis keturunan adalah tergolong sederhana akan tetapi memiliki adat yang sangat kental yang harus di junjung hingga sekarang ini.

Hal ini juga dimungkinkan oleh sistem kekerabatan mereka, umumnya masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan yang berbentuk kekeluargaan jauh atau luasnya dimana anggota kekeluargaan bukan hanya meliputi bapak, ibu, dan anak-anak, tetapi juga meliputi nenek-nenek, kakek, saudara, mertua menantu, cucu, dan cicit. Pada dasarnya sistem kekerabatan mengikuti pola kekeluargaan yang bersifat bilateral, semua pihak dalam keluarga, baik kerabat istri maupun kerabat suami memiliki hak yang sama dalam menyelenggarakan rumah tangga.

Sistem kekerabatan di daerah ini disebut *assiajingeng* yaitu ikatan kekerabatan yang sangat kuat dan erat. Atau dari kata *siajing* dapat menunjukkan

bahwa seorang masih terikat pada garis keturunan tertentu, maka dapat diketahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang dalam masyarakat.

Adapun bahasa pergaulan sangat penting di satu daerah agar supaya komunikasi dengan warga lain dapat berjalanan dengan lancar. Bahasa mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena melalui bahasa setiap individu dapat menyampaikan isi hatinya, buah pikiran, pandangan-pandangannya, gagasan-gagasan serta ide-idenya kepada orang lain. Jelasnya melalui bahasa setiap orang dapat berkomunikasi dengan orang lain.

#### 4. Agama dan pendidikan

##### a. Keadaan agama

Sebagaimana penulis telah kemukakan pada uraian sebelumnya bahwa jumlah penduduk Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone pertahun 2017 dengan jumlah penduduk 3.554 jiwa. Secara keseluruhan semua beragama Islam atau 100% beragama Islam, namun dalam perilaku sebagian anggota masyarakat telah menjadi persimpuhan dan pembaharuan antara kepercayaan lama dan akidah Islam itu sendiri. Hal ini lebih tampak pada upacara-upacara dari hidup, maupun upacara keagamaan lainnya, di mana pembaharuan itu tampil dari segi perilaku masyarakat.

misalnya saja ketika mendaftarkan atau ingin memulai untuk pertama kali mengaji sebagai pemula harus didahului dengan upacara kecil yang disebutnya pappatajang ati (mempertajam hati) hal ini dimaksud agar anak itu kelak cerdas dan tajam hatinya, cepat mengerti ajaran dari guru mengajinya.

Masalah yang menyangkut persentuhan antara kepercayaan (adab) dengan ajaran agama Islam dalam perilaku masyarakat. Hal ini disebabkan karena sebab pada saat masuknya Islam di tanah bugis Bone kepercayaan telah ada sebelumnya seperti animisme, dinamisme, dan kedewaan masih diperaktekkan sebagaimana biasanya yang akhirnya agama islam diterima disamping itu kepercayaan lain masih tetap dijalankan.

Masyarakat Desa Waji Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone umumnya beragama Islam sehingga sarana ibadah yang hanya ada Mesjid sebagai tempat ibadah orang Islam, sedangkan untuk sarana Ibadah Agama lain tidak ada.

Tabel 4.2  
Distribusi Data Berdasarkan Jumlah Masjid Desa Waji Kecamatan  
Tellusiattinge Kabupaten Bone

DUSUN	JUMLAH MASJID
PATTUNUNGE	-
MAULENG	1
LALLERE'E	1
KUNG	1
TAKKU	1
PACUMPURENG	1
TOTAL	5

*Sumber data , Data Sekunder dokumen kantor desa waji.*<sup>60</sup>

b. Keadaan pendidikan

Untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan pendidikan di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone, penulis akan mengemukakan data tentang sarana pendidikan formal yang ada di wilayah Desa Waji dan tingkat pendidikan masyarakat.

---

<sup>60</sup>Pemerintah Kabupaten Bone, *buku saku sistem database desa dan kelurahan desa*. (Bone:Desa Waji, 2017) h.2.

Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Waji sangat terbatas, jumlah lembaga dan sarana pendidikan formal yang ada di Desa Waji.

Tabel 4.3  
Distribusi Data Berdasarkan Fasilitas Pendidikan Desa Waji Kecamatan  
Tellusiattinge Kabupaten Bone

DUSUN	TK/RA	SD/MI
PATTUNUNGE	-	1
MAULENG	1	-
LALLERE'E	-	-
KUNG	1	-
TAKKU	1	1
PACUMPURENG	-	-
TOTAL	3	2

*Sumber data, data Sekunder : dokumen kantor desa waji.<sup>61</sup>*

Dengan melihat sarana pendidikan atau lembaga formal yang ada di wilayah Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone, menunjukkan bahwa masih membutuhkan beberapa sarana pendidikan, terutama sarana pendidikan menengah pertama dan tingkat menengah atas, di mana sekolah menengah pertama dan menengah akhir belum ada sama sekali, begitupula sarana lainnya.

Berbicara mengenai tingkat pendidikan masyarakat Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone dapat dikatakan bahwa penduduk pernah memasuki suatu lembaga pendidikan, hanya sebagian kecil masyarakat Desa Waji yang tidak sempat mengikuti lembaga pendidikan formal. Pada saat itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk memungkinkan bagi mereka untuk memasuki lembaga pendidikan formal yang disebabkan oleh situasi dan kondisi ekonomi tidak mendukung. Untuk dapat mengetahui pendidikan Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone dapat dilihat dari tabel berikut ini.

---

<sup>61</sup>Pemerintah Kabupaten Bone, *buku saku sistem database desa dan kelurahan desa*. (Bone:Desa Waji, 2017) h.2.

Tabel 4.4

Distribusi Data Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Waji  
Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BUTA HURUF	80	60	140
2	SD/SEDERAJAT	482	440	922
3	SMP/SEDERAJAT	145	134	279
4	SMA/SEDERAJAT	155	136	291
5	DIPLOMA	7	6	13
6	SI	40	41	81
7	S2	1	1	2
8	S3	-	-	-

*Sumber data, Data Sekunder : dokumen kantor desa waji.*<sup>62</sup>

Berdasarkan data di atas, dengan demikian berarti jumlah penduduk yang lain, yang belum tercantum kedalam table di atas, maka mereka tergolong generasi tua yang tidak sempat masuk disuatu lembaga pendidikan formal dan golongan anak-anak yang masih dibawah umur sebagai standar wajib sekolah atau belum dapat masuk di suatu lembaga pendidikan formal.

Adapun yang termasuk non-formal di Desa Waji, seperti pengajian ditingkat dasar atau pengajian dengan metode *iqra'* terdapat delapan kelompok, dari jumlah ini pelaksanaanya masing-masing di rumah penduduk, di rumah sang Guru, dan dilakukan di Mesjid.

Pelaksanaan pendidikan non-formal ini, masyarakat melaksanakannya tidak dipungut biaya hanya semata-mata untuk membina dengan penuh keiklasan, walaupun diberikan beras atau uang atau dalam bentuk yang lain sebagai wujud

---

<sup>62</sup>Pemerintah Kabupaten Bone, *buku saku sistem database desa dan kelurahan desa*. (Bone:Desa Waji, 2017) h.2.

tanda terima kasih orangtua santri kepada sang guru yang telah mengajarkan anak-anaknya mengaji.

## 5. Sarana kesehatan dan sarana umum lainnya

### a. Sarana kesehatan

Untuk dapat mengetahui tingkat kesehatan masyarakat desa waji dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5  
Distribusi Data Berdasarkan Sarana Kesehatan Masyarakat Desa Waji Kecamatan  
Tellusiattinge Kabupaten Bone

DUSUN	Polindes	Posyandu
PATTUNUNGE	-	-
MAULENG	1	1
LALLERE'E	-	-
KUNG	-	1
TAKKU	-	1
PACUMPURENG	-	1
TOTAL	1	4

*Sumber data, Data Sekunder : dokumen kantor desa waji.*<sup>63</sup>

Adapun fasilitas kesehatan, setiap dusun Desa Waji memiliki sarana posyandu sehingga layanan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi.

---

<sup>63</sup>Pemerintah Kabupaten Bone, *buku saku sistem database desa dan kelurahan desa*. (Bone:Desa Waji, 2017) h. 3.

b. Sarana umum lainnya

Untuk dapat mengetahui tingkat sarana umum lainnya Desa Waji dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6  
Distribusi Data Berdasarkan Sarana Umum Masyarakat Desa Waji  
Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone

DUSUN	Pasar	Lapangan olahraga	Tempat sampah umum
PATTUNUNGE	-	3	-
MAULENG	1	-	-
LALLERE'E	-	-	-
KUNG	-	1	1
TAKKU	-	1	-
PACUMPURENG	-	1	-
TOTAL	1	6	1

*Sumber data, Data Sekunder : dokumen kantor desa waji.*<sup>64</sup>

**B. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone**

Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak dari perkawinan, setelah terjadinya perceraian dan kedua orangtua harus berpisah maka ibu dan ayah berkewajiban memelihara anak-anak mereka bersama dengan cara sendiri-sendiri.

Fakta yang tidak dapat dielakkan adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone, banyak anak yang menjadi korban perceraian orangtuanya. Dari berbagai sumber ada beberapa bukti bahwa tidak terpenuhinya tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak kepada anak akibat perceraian oleh kedua orangtuanya terutama oleh ayahnya setelah bercerai. Walaupun data jumlahnya kurang tepat, tapi dari berbagai sumber hasil

---

<sup>64</sup>Pemerintah Kabupaten Bone, *buku saku sistem database desa dan kelurahan desa*. (Bone:Desa Waji, 2017) h.3.



wawancara yang dijadikan sampel oleh peneliti, ada berbagai bentuk dari tanggung jawab orangtua terhadap anak dan pemberian nafkah anak akibat perceraian di Desa Waji. Dari berbagai wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka di Desa Waji terdapat keterangan dan pendapat mengenai tanggung jawab praktek pemberian nafkah anak setelah perceraian adalah sebagai berikut:

Anak yang menjadi korban perceraian, sebut saja Tasya (bukan nama sebenarnya) adalah salah satu anak korban perceraian di Desa Waji. Ia masih berumur 12 tahun yang duduk di kelas 5 sekolah dasar. Anak dari bapak Anas dan ibu Anti. Terkait dengan tanggung jawab orang tua dengan pemberian nafkah anak oleh ayahnya, ibu Anti menuturkan bahwa:

“tidak pernah, sama sekali tidak pernah. Bahkan untuk menjenguk anaknya pun tidak. Untuk biaya sekolah maupun kebutuhan anak, saya sendiri yang mencukupinya kadang ada uang dari ibu saya.”<sup>65</sup>

Anak yang menjadi korban perceraian, sebut saja Marni dan Fahri (bukan nama sebenarnya) adalah salah satu anak korban perceraian di Desa Waji. Anak dari bapak Ari dan ibu Malu. Masing-masing berumur 15 tahun dan 8 tahun. Ibu Malu menuiturkan bahwa:

“setelah perceraian mantan suami saya tidak pernah memberikan nafkah kepada anak.”<sup>66</sup>

Anak yang menjadi korban perceraian, sebut saja Cici (bukan nama sebenarnya) adalah salah satu anak korban perceraian di Desa Waji. Dia adalah anak dari ibu

---

<sup>65</sup>Anti, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone, 05 Desember 2018.

<sup>66</sup>Malu, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone, 06 Desember 2018.

Eni dan bapak hendra. Anak ini baru berumur 4 tahun. Ibu Eni memberikan keterangan bahwa:

“saya telah digugat cerai oleh suami saya karena dia telah mempunya wanita lain. Sebelum bercerai, suami saya seorang perantau namun tidak memperdulikan istri dan anak, pemberian nafkah juga tidak pernah.”<sup>67</sup>

Kemudian terkait tanggung jawab orang tua terhadap anak, ia menyampaikan bahwa :

“samapai saat ini, mantan suami saya tidak ada kabar lagi dan sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada anak baik itu untuk pendidikan maupun kebutuhan lainnya.”

Anak yang menjadi korban perceraian, sebut saja Lala dan arif (bukan nama sebenarnya) adalah salah satu anak korban perceraian di desa waji. Masing-masing berumur 9 dan 4 tahun. Dia merupakan anak dari bapak Aco dan ibu Ana.

Terkait tanggung jawab orang tua terkait dengan nafkah anak, ia menyampaikan bahwa:

“setelah bercerai hubungan saya dan mantan suami saya tidak terjalin dengan baik, bahkan mantan suami saya sangat jarang menjenguk anaknya. Saya merawat anak di rumah orang tua. Mantan suami saya tidak pernah memberikan nafkah kepada anak, maka semua kebutuhan anak ditanggung oleh oranmg tua saya, karena saya tidak mempunyai pekerjaan.”<sup>68</sup>

Berbeda denbgan kasus-kasus diatas deni dan gaffar (bukan nama sebenarnya) juga merupakan anak korban perceraian di desa waji. Putra dari bapak sonusi dan ibu wati. Tanggung jawab orang tua terkait dengan nafkah anak setelah perceraian, ibu wati mengakju bahwa:

---

<sup>67</sup> Eni, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone, 08 Desember 2018.

<sup>68</sup> Ana, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone, 10 Desember 2018.

“mengenai nafkah anak setelah bercerai mulai tahun 2015, mantan suami saya yang memberikan nafkah anak. Setiap bulan biasanya saya teriam uang sebesar 500.000-600.000 dan itu sudah cukup dengan kebutuhan anak saya.”<sup>69</sup>

Perceraian adalah bagian dari hukum duniawi, tetapi setelah terjadinya perceraian, dalam ajaran islam, suami atau istri harus tetap menjalin silaturahmi, apalagi bagi istri yang telah diceraikan. Sebaiknya, suami yang telah mentalak istrinya memiliki keturunan dan wajib dididik dan dipelihara dengan baik.<sup>70</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian ketiga yang mengatur tentang kewajiban suami dijelaskan dalam pasal 80 ayat (4) huruf C “sesuai dengan kondisi penghasilannya suami menanggung “biaya pendidikan bagi anak.” Selanjutnya pada bab XIV menjelaskan mengenai pemeliharaan anak dijelaskan dalam pasal 98 sampai 106. Lebih lanjut terkait dengan nafkah anak di jelaskan dalam pasal 104 ayat (1) “semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.”

Dalam praktek yang didapatkan di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone sangat tidak sejalan atau bertentangan dengan pasal 80 ayat (4) huruf C dan pasal 104 ayat (1). Dimana seharusnya walaupun setelah bercerai kewajiban ayah untuk tetap menanggung biaya pendidikan maupun penyusuan anaknya tidak berhenti karena sebuah perceraian. Namun fakta di Desa Waji bahwa setelah bercerai ayahnya sudah tidak lagi memberikan biaya pendidikan dan nafkah kepada anak.

---

<sup>69</sup>Wati, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone, 07 Desember 2018.

<sup>70</sup>Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang* (Perspektif Fiqih Munaqahat Dan Uu No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya) (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.56.

Dalam pasal 105 huruf C menjelaskan “dalam hal terjadinya perceraian” biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” Dalam bagian ketiga yang mengatur akibat perceraian terkait dengan akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur oleh pasal 156 huruf D “ semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.”

Dari bunyi pasal 105 huruf C tidak berjalan baik dimasyarakat Desa Waji, fakta yang terjadi di Desa Waji, setelah bercerai anak banyak yang diasuh oleh ibunya dan bapaknya sudah tidak lagi memberikan biaya pemeliharaan untuk anaknya bahkan ada yang sampai menjengukpun tidak pernah. Menurut penulis seharusnya walaupun hak asuh anak oleh ibunya, ayah harus tetap memberikan biaya pemeliharaan untuk anak. Selain itu juga bertentangan bunyi pasal 156 huruf D, seharusnya ayah yang menanggung nafkah anak menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa. Namun yang terjadi di Desa Waji bahwa kebanyakan anak korban perceraian masih usia anak-anak (belum dewasa) dan sudah tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya lagi, seharusnya ayah tetap memberikan biaya hadhanah dan nafkah untuk anaknya.

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Sebelum maupun sesudah terjadinya perceraian, ayah tetap berkewajiban memberikan biaya atau nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Aturan dalam Kompilasi Hukum Islam ini terkait dengan nafkah anak tidak berjalan dengan efektif di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge

Kabupaten Bone. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada bab III yang menjelaskan hak dan kewajiban anak yang diatur dalam pasal 4 sampai pasal 19. Pasal 13 (1) huruf C menjelaskan “ setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan penelantaran.. menurut penulis seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya baik sebelum maupun sesudah perceraian merupakan bentuk penelantaran anak oleh ayahnya. Berpedoman dari pasal ini, bahwa di Desa Waji, ayah setelah bercerai tidak memberikan nafkah kepada anaknya, meskipun ada yang memberi namun masih dirasa kurang maksimal. Tentunya hal tersebut melanggar ketentuan dalam pasal ini sebagai bentuk penelantaran anak .

Kemudian dalam pasal 14 ayat (2) dalam hal pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari orangtuanya; dan
- d. Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 14 menjelaskan bahwa ketika terjadi pemisahan antara anak dengan kedua orangtuanya, anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan,

pendidikan dari kedua orangtuanya. Yang terjadi dimasyarakat Desa Waji kebanyakan setelah bercerai anak banyak yang diasuh ibunya, dan hanya mendapat pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan hanya dari ibunya saja. Selain itu juga seharusnya anak masih mendapatkan pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya, namun di Desa Waji ibu sebagai orangtua tunggal harus berusaha dengan keras untuk memenuhi semua kebutuhan anaknya.

Kemudian pada bagian keempat kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua dijelaskan pada pasal 26 ayat (1) huruf A “orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Fakta yang terjadi di Desa Waji juga tidak sejalan dengan pasal 26 ayat (1) huruf A, karena seharusnya kewajiban orangtua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya. Kewajiban ini tidak dijalankan ayahnya setelah bercerai, fakta lapangan selain ayah tidak memberikan nafkah pada anaknya setelah perceraian, banyak ayah yang sampai jarang dan bahkan sama sekali tidak pernah menjenguk anaknya. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan pasal ini yang mengatur kewajiban dan tanggungjawab orangtua yang dalam faktanya tidak dilaksanakan oleh ayah.

Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya terkait tinjauan yuridis tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone diantaranya ialah keluarga ibu anti, ibu eni, ibu malu, ibu ana dan ibu kasmia bahwa nafkah anak sama sekali tidak diberikan oleh ayahnya. Hal ini sedikit berbeda dengan keluarga bapak sanusi dan ibu wati. Menurut keterangan dari bapak sanusi bahwa ia mengaku masih

memberikan uang kepada anaknya saat bertemu, walaupun tidak pasti waktu bertemunya. Pemberian tersebut bentuk tanggung jawab orang tua walaupun pemberian tersebut bukan dalam bentuk nafkah, hanya merupakan uang saku untuk anaknya. Dengan nominal yang dikatakan sedikit, tentunya sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Sedangkan dalam keluarga ibu wati, mengaku bahwa baru diberi nafkah untuk anak sejak 2015, sedangkan ia bercerai pada tahun 2014. Walaupun pada tahun 2015 nafkah anak dari suaminya sudah cukup untuk memberi kebutuhan pada anaknya.

Yang terjadi dimasyarakat umumnya bahwa setelah bercerai anak banyak yang diasuh oleh ibunya dan ayahnya sudah tidak lagi memberikan nafkah untuk anaknya. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang perlindungan anak yang mengatur mengenai hak-hak anak khususnya tanggungjawab orangtua kepada anak setelah perceraian tidak berjalan dengan efektif di Desa Waji. Praktek pemenuhan nafkah anak adalah bentuk tanggung jawab orangtua yang tidak terpenuhi, seharusnya setelah bercerai kedua orangtuanya tetap berkewajiban mengurus anak terutama pemenuhan segala kebutuhan atau nafkah yang menjadi tanggungjawab kedua orangtuanya. Akan tetapi juga masih ada yang memberi nafkah kepada anaknya walaupun kurang maksimal.

Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak selanjutnya ditegaskan dalam Bab XIA larangan pasal 76 B “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Dan dalam pasal

77 B menjelaskan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Serinci itu Undang-Undang mengatur tentang kewajiban orangtua dan tanggungjawab orangtua dalam pemenuhan nafkah anak setelah terjadi perceraian, menurut penulis hal tersebut sudah sampai pada rana penelantaran anak pasal 76 B yang dilakukan oleh ayahnya karena tidak bertanggungjawab atas nafkah kepada anak dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 77 B Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam fakta yang terjadi dimasyarakat Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone, tentunya tidak berjalan dengan efektif.

Faktor tidak terpenuhinya tanggungjawab orangtua terhadap nafkah anak akibat perceraian ialah :

- a. kurangnya komunikasi yang baik dari kedua orangtuanya setelah bercerai,
- b. ekonomi yang lemah, dan
- c. kurangnya pengetahuan agama dalam keluarga.

**C. Akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak setelah perceraian di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone**

Hal yang harus dipertahankan setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua adalah kesadaran untuk tetap untuk menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak. Akibat secara langsung bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah dengan tidak tinggal lagi bersama kedua orang tuanya, dimana anak secara otomatis akan tinggal bersama



salah satu orang tua dari si anak tersebut. Akibatnya rawan sekali kelalaian-kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak untuk memberikan apa yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang anak secara wajar.

Dalam putusan cerai talak disertai putusan pembebanan nafkah anak tersebut, ayah dari anaklah yang dibebani pembiayaan untuk memberikan nafkah anaknya yang tinggal atau berada dalam asuhan ibunya. Akan ada dua pembahasan mengenai putusan yang penulis paparkan ini terhadap akibat hukum bagi kedua orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban, yaitu dalam hal ini adalah yang pertama apabila ayah dari anak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dan yang kedua apabila ibu dari anak tersebut juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh atau yang tinggal bersama anaknya.

Akibat lalainya orang tua dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua kepada anak setelah perceraian maka dapat dilakukan atau dapat diupayakan hal-hal sebagai berikut: *pertama*, permohonan eksekusi. Maka mengingat bahwa putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan mengikat, putusan pengadilan juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Yaitu kekuatan dimana putusan Pengadilan tersebut dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi dengan alat negara apabila pihak yang telah dinyatakan oleh pengadilan untuk memenuhi suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan dan apabila pihak yang seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut tidak melaksanakan dengan sukarela sesuai dengan putusan pengadilan atau sengaja melalaikan untuk tidak menjalankan suatu putusan maka dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi putusan tersebut

secara paksa yaitu dengan cara pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang terkait.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama akan menertibkan penetapan aanmaning, yaitu berisi perintah kepada Jurusita supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang aanmaning, dalam sidang aanmaning tersebut ketua pengadilan agama akan menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan termohon melaksanakan putusan, jika dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, pemohon eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, ketua pengadilan agama menerbitkan perintah eksekusi.

Namun menurut penulis alangkah baiknya ada upaya lain selain melakukan eksekusi terhadap mantan istri atau ayah dari anak tersebut, dengan interpretasi Hakim untuk mengembangkan hukum menjadi lebih fleksibel dan tidak terkesan kaku, dengan melakukan pendekatan secara kultural yaitu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atau ada upaya dari pengadilan untuk memberitahu ke kantor tempat si ayah bekerja terhadap beban yang sedang ditanggung oleh ayah dari anak tersebut, untuk kemudian dapat dijadikan sebagai pertimbangan kebijakan kantor terhadap karyawan yang sedang mengalami kesulitan. *Kedua*, pencabutan kuasa asuh. Berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anak-anaknya; ia berkelakuan buruk sekali.

Namun, apabila kekuasaan orang tua dicabut mereka tetap masih berkewajiban dalam melakukan pemeliharaan terhadap anak-anaknya, hal ini sesuai dengan

pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan :

“Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anak tersebut”.

Akibat hukumnya:

1. Pihak yang dibebani pihak nafkah apabila tidak melaksanakan kewajibannya dapat dimintakan eksekusi.
2. Kuasa pengasuh apabila tidak melaksanakan kewajiban maka akan bisa dimintakan pencabutan hak asuh.

Akibat hukum perceraian:

1. Akibat perceraian dalam Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami atau istri atau harta bersama. Akibat hukum anak ialah apabila terjadi perceraian, maka baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai putusan anak-anak, pengadilan memberikan putusannya. Jadi ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana ayah kenyataannya tidak dapat memberikan

kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul atau menanggung biaya tersebut.<sup>71</sup>

## 2. Akibat perceraian dalam hukum adat

Pada umumnya menurut hukum adat yang ideal, putus perkawinan karena kematian dan perceraian membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami dan istri, terhadap pemeliharaan, pendidikan, dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat juga terhadap harta bersama. Segala sesuatunya berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dan yang lain.<sup>72</sup>

## 3. Akibat perceraian dalam hukum islam

Menurut hukum islam setelah terjadinya suatu perceraian, maka akan menimbulkan hukum tertentu, menurut kompilasi hukum islam 156, akibat putusnya perceraian karena perceraian ialah

- 1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - a. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu.
  - b. Ayah.
  - c. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah.
  - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.

---

<sup>71</sup>Hilman hadikusuma, *hukum perkawinan indonesia menurut: hukum perundangan, hukum adat*, (bandung:mandar maju,1990), h. 188-189

<sup>72</sup>Ibid, 189 sampai 190

- e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
  - f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- 2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
  - 3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula
  - 4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
  - 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (A), (B), (C), dan (D).
  - 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.<sup>73</sup>

Hasil penelitian menyatakan perkawinan yang gagal atau orang tua yang cerai, jelas akan membawa dampak, baik secara psikis maupun secara fisik terhadap perkembangan dan masa depan anak. Secara psikis, perceraian jelas akan

---

<sup>73</sup>Kompilasi hukum islam, 72

menyebabkan anak kehilangan kasih sayang yang utuh dari orang tuanya. Secara fisik, perceraian sering kali menyebabkan anak kehilangan masa depan.

Penetapan uang nafkah anak yang masuk dalam putusan pengadilan perkara perceraian dalam prakteknya hanya dipenuhi triwulan pertama saja dengan alasan orang tua (ayah) sudah tidak memiliki pekerjaan tetap dan orang tua telah berpisah rumah sehingga tidak diketahui rumahnya, seperti dalam kutipan wawancara dengan ibu malu, ibu eni, anti, kasmia dan wati bahwa:

“apa alasan seorang ayah tidak memenuhi tanggung jawab kepada anak setelah terjadinya perceraian?”

“pekerjaan mungkin tidak tetap, begitupun dengan penghasilannya mungkin juga tidak tetap dan bisa jadi mungkin sudah punya keluarga baru jadi bisa jadi keluarga sebelumnya atau anak sebelumnya tidak terpenuhi”<sup>74</sup> inti dari hasil wawancara beberapa masyarakat.

Untuk membangun konsepsi hukum pidana terhadap mantan suami (ayah) yang tidak melaksanakan atau menolak melaksanakan kewajibannya sesuai putusan Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahapan, yakni pertama, menemukan upaya menemukan sebuah perbuatan menjadi perbuatan pidana, dan kedua melakukan perbandingan terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pidana di luar KUHP, yang muatannya berkaitan atau relevan dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi. Perbuatan tidak melaksanakan pemberian uang nafkah merupakan perbuatan penelantaran terhadap anak merupakan tindak pidana di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (Undang-Undang Perlindungan Anak).

---

<sup>74</sup>Malu, Eni, Anti, Kasmia dan Wati, *Wawancara*, di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone, 29 November-29 Desember 2018

Di dalam pasal 304 KUHP, dinyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Selanjutnya, di dalam pasal 76 huruf B Undang-Undang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sanksi yang memiliki daya paksa mengenai uang nafkah dalam perceraian, dapat benar-benar dilaksanakan. Karena sanksi yang memiliki kekuatan memaksa ada pada domain hukum pidana yang dapat dijatuhkan pada orang tua (ayah) yang mengabaikan putusan pengadilan agama.

Dengan tidak diaturnya sanksi pidana yang demikian, maka tidak ada mekanisme di dalam Undang-Undang Perkawinan, yang dapat dipergunakan untuk memastikan bahwa putusan Pengadilan Agama yang menghukum suami sebagai seorang ayah membayar nafkah, benar-benar dilaksanakan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari pembahasan diatas, yaitu:

1. Tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam bentuk nafkah anak akibat perceraian di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone dalam tinjauan kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak sesuai dengan ketentuan dalam kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Praktek pemenuhan nafkah anak oleh kedua orang tuanya tidak terpenuhi, seharusnya setelah bercerain kedua orang tuanya tetap berkewajiban mengurus anak terutama pemenuhan nafkah yang menjadi tanggung jawab ayahnya. Pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone selama ini belum mampu untuk melaksanakan ketentuan, disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua, rendahnya pendidikan orang tua, serta rendahnya moral orang tua.
2. Akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak maka dapat diupayakan dua hal: pertama, terhadap pihak yang dibebani biaya nafkah, apabila tidak melaksanakan kewajibannya dapat dimintakan eksekusi. Kedua, terhadap pemegang kuasa asuh anak, apabila tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dimintakan permohonan



percabutan kuasa asuh. Akan tetapi pencabutan kuasa asuh anak tersebut tidak menjadikan kewajiban sebagai orang tua anak gugur.

## **B. Implikasi penelitian**

1. Agar kompilasi Hukum Islam dapat berjalan baik di masyarakat, khususnya terkait tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam bentuk nafkah anak akibat perceraian maka seharusnya ada sosialisasi dan kontrol dari pemuka Agama dan tokoh masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian terkait Undang-Undang perlindungan anak juga perlu ada sosialisasi, kerjasama dan kontrol dari Negara, Pemerintah, dan Masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar pemenuhan hak-hak anak khususnya setelah perceraian dapat berjalan dengan baik dan tentunya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan anak.
2. Pemerintah pembuat Undang-Undang, pengaturan mengenai jaminan terhadap hak anak diatur sedemikian banyak di Indonesia ini, namun untuk aturan mengenai jaminan hak anak setelah perceraian harus dipertegas. Pengaturan mengenai jaminan hak terhadap anak pasca perceraian hanya bersifat mengatur tanpa ada sanksi tegas yang menyertainya, hal yang demikian yang kemudian memicu lalainya salah satu atau bahkan kedua orang tua untuk memenuhi kewajibannya setelah perceraian.
3. Seharusnya kedua orang tua yang sudah bercerai, harus tetap menjalankan kewajibannya khususnya seorang ayah yang harus tetap membiayai anaknya sehingga para orang tua menjadi sadar akan kewajiban terhadap anak-anaknya supaya tidak terjadi ketimpangan dalam hidupnya kelak

disebabkan perceraian kedua orang tuanya tersebut dan bila anak tidak mendapatkan haknya dalam pendidikan dan pembiayaan oleh seorang ayah maka seorang wali atau kerabat dari orang tua anak tersebut dapat mengajukan gugatan dan dapat meminta hakim untuk menetapkan mengasuh anak tersebut sampai ia berdiri sendiri atau dewasa.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an.

Abdurrahman. 2004. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.

Afandi, Ali. 1989. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdara*. Cet, Jakarta: Bina Aksara.

Ahmad, Beni Subeni. 2008 *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Perspektif Fiqih Munaqahat Dan Uu No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya* Bandung: Pustaka Setia

Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Arief, Gosita. 1996. *Makalah Pengembangan Aspek Hukumundang-Undang peradilan Anak Dan Tanggung Jawab Bersama, Seminar Nasional Perlindungan Anak*, Diselenggarakan Oleh Unpad, Bandung.

Atikunto, Suhartini . 2000. *Manajemen Pendidikan*. Cet V; Jakarta: Kineka Cipta.

Benaim.1979. *Mariage And Family Interaction*, 5th Edition (Iiinoice Thhe Dorsey Press.

Departemen Pendidikan Nasiona. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fauzi. D.A. 2006. *Perceraian Siapa Takut*. Jakarta: Restu Agung

Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqhi Munaqahat*. Jakarta: Kencana.

Gunarsa, S. D. *Psikologi untuk Keluarga*. Jakarta: Gunung Agung Mulia, 1999.

Gulton, Maidan. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Prempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Hadi, Sutrisno. 1986. *Metologi Research*. Jakarta: Universitas Gajah Mada.

Hadikusuma, Hilman. 1990 *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Hukum Perundangan, Hukum Adat*, Bandung:Mandar Maju.

Hadisuprpto, Paulus. 2013. *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Surabaya: Media Pustaka.

Hadhanah, (hak asuh anak), di <http://abiyazid.wordpress.com/2008/02/27hadhanah-hak-asuh-anak>.

Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.

Hasan, Mustafa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustakasetia.

Hazairin. 1961. *Hukum kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Tintamas.

Hurlock, E. B. 1994. *Psikolok Perkembangan, suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.

Kementrian Agama Republik Indonesia. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Magfirah Pustaka.

Kertamuda, Fatchiah E. 2009. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika

- Latif, H.M Djamil. 1995. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Balai Aksara dan Yudistira
- Lulistiani, Siska Lis. 2001. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*.
- Makarao, Muhammad Taufik Dkk. 2003. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta PT R, Media.
- Makrum, M. Enoch. 1991. *Anak, Keluarga Dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marlina. 2008. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Maryage, Emmery, E.R. 1999. *Divorce, Chlidenen Adjusment, 2nd Edition*. New York: Prentice Hall Interenational.
- Masdoeki, Arif dan M.H Tirtahamiddjaja. 2011. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademik Persindo.
- Protjohamitjojo, Martiman 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Qassing, A Qadir Dan Wahyudin Halim. 2013. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disetasi dan Laporan Penelitian* (Edisi Revisi 1. Makassar: Alauddin Press.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saleh, K Wantjik. 1996. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Sumiarni, MG. Endang dan Candra Halim. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Syrifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqhi Munaqaha dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta, Kencana.
- Tiro, Arif. 1999. *Dasar-Dasar Statistic*. Edisi Revisi. Cet 1: UNM Makassar.
- Teguh, Muhammad. 2005. *Metologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*. Edisi 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Pemerintah Kabupaten Bone, *buku saku sistem database desa dan kelurahan desa*. Bone:Desa Waji, 2017
- Wadong, Maulana Hasan 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Grasindo.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1.

#### Daftar wawancara

No.	Nama	Umur	Tanggal/tempat wawancara	Profesi
1	Wati	38	Waji/5 desember 2018	Masyarakat
2	Malu	34	Waji/6 desember 2018	Masyarakat
3	Anti	38	Waji/7 desember 2018	Masyarakat
4	Eni	22	Waji/9 desember 2018	Masyarakat
5	Kasmiah	27	Waji/13 desember 2018	Masyarakat

## Lampiran 2.



Gambar 1. Wawancara dengan ibu wati, (38 tahun), 5 desember 2018, masyarakat desa waji



Gambar 2. Wawancara dengan ibu malu, (34 tahun), 6 desember 2018, masyarakat desa waji





Gambar 3. Wawancara ibu anti, (38 tahun), 7 desember 2018, masyarakat desa waji





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 8658/S.01/PTSP/2018  
 Lampiran :  
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Bupati Bone

G-  
 Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3578/SH.01/PP.00.9/11/2018 tanggal 13 November 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ISMAIL  
 Nomor Pokok : 10100114143  
 Program Studi : HAPK  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Jl. H.M.Yasin Limpo No. 36, Samata

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS DESA WAJI KECAMATAN TELLUSIATTINGE KABUPATEN BONE TAHUN 2018) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 16 November s/d 16 Desember 2018

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di Makassar  
 Pada tanggal : 14 November 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
 PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**A.M. YAMIN, SE., MS.**  
 Pangkat : Pembina Utama Madya  
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth  
 1. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar.  
 2. Peringgal

SMMP PTSP 14.11.2018



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [dpmpsp@sulselprov.go.id](mailto:dpmpsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90222





**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

**IZIN PENELITIAN**

Nomor: 070/12.1505/XI/IP/DPMPTSP/2018

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : MUHAMMAD ISMAIL  
 NIP/Nim/Nomor Pokok : 10100114143  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Alamat : Desa Waji Kec. Tellu Siattinge  
 Pekerjaan : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**" TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK  
 SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS DESA WAJI KECAMATAN  
 TELLU SIATTINGE KABUPATEN BONE TAHUN 2018)"**

Lamanya Penelitian : 29 November 2018 s/d 29 Desember 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Desa Waji Kecamatan Tellu Siattinge
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 ( satu ) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 29 November 2018

KEPALA,

**Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
4. Camat Tellu Siattinge Kab. Bone di Tokaseng.
5. Kepala Desa Waji Kec. Tellu Siattinge di Waji
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
KECAMATAN TELLUSIATTINGE  
DESA WAJI

SURAT KETERANGAN PENELITIAN  
NOMOR:165 / DW/TS/XII/2018

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adakah kepala desa:

Nama :Dra. Hj Syamsiar, M.Si

Jabatan :Kepala Desa

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama :Muhammad Ismail

Nim :10100114143

Pak/jur :Syariah Dan Hukum/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Universitas :Universitas Islam Negeri Makassar

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: *tinjauan yuridi tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian "( studi kasus desa waji kecamatan tellusiattinge kabupaten bone tahun 2018)"* dengan waktu penelitian 1 (satu) bulan terhitung dari bulan November-Desember 2018

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan sesuai dengan keperluan.

Waji, 11 desember 2018



### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Ditinjau Di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone Tahun 2018)", yang disusun oleh Muhammad ismail, Nim: 10100114143, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diteliti dan dikoreksi secara saksama serta disetujui untuk diseminarkan (seminar proposal).

Makassar, 10 Oktober 2018 M  
1 Shafar 1440 H

Pembimbing I : Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag



Pembimbing II : Dra. Hj. Hartini, M. H.I



Disetujui oleh:  
Ketua Jurusan/Prodi



Dr. H. Supardin, M.H.I.  
NIP. 196503021994031003



### PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal yang berjudul, "TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Kasus Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone tahun 2018). " yang disusun oleh Muhammad Ismail, NIM: 10100114143, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang seminar proposal skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2018, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat melaksanakan penelitian (dengan beberapa perbaikan).

Demikian pengesahan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 22 Oktober 2018 M  
13 Shafar 1440 H

#### DEWAN PENGUJI:


Penguji I : Dr. H. Supardin, M.H.I.  
Penguji II : H. Zulfahmi Alwi, M.Ag.Ph.D  
Pembimbing I : Dr. H.Muh. Saleh Ridwan, M.Ag  
Pembimbing II : Dr.Hj. Hartini Tahir, M.H.I

()

()

()

()

Disahkan oleh:  
Ketua Jurusan/Prodi  
()  
Dr. H. Supardin, M.H.I.  
NIP. 196503021994031003



### PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul, "TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Kasus Desa Waji Kecamatan Telluataingge Kabupaten Bone Tahun 2018) ", yang disusun oleh Muhammad Ismail, NIM: 10100114143, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diseliti dan dikoreksi secara saksama serta disetujui untuk diseminarkan (seminar hasil)..

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 10 Januari 2019 M  
3 Jumadil Awal 1440 H

Penguji I : Dr. H. Supardin, M.H.I.

Penguji II : H. Zulfahmi Alwi, M.Ag., Ph.D.

Pembimbing I : Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag

Pembimbing II : Dra. Hj. Hartini, M. H. I.

Disetujui oleh:  
Ketua Jurusan/Prodi

Dr. H. Supardin, M.H.I.  
NIP. 196503021994031003

### PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul, "TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Kasus Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone Tahun 2018)", yang disusun oleh Muhammad Ismail NIM: 10100114143, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang seminar hasil yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 18 Januari 2019 M, bertepatan dengan 12 Jumadil Awal 1440 H, dinyatakan telah diperiksa secara saksama, dan disetujui untuk dimunaqar'ahkan.

Makassar, 22 Januari 2019 M  
16 Jumadil Awal 1440 H,

Penguji I : Dr. H. Supardin, M.H.I.

Penguji II : H. Zulfahmi Alwi, M.Ag., Ph.D.

Pembimbing I : Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Hj. Hartini, M.H.I.

Disetujui oleh:  
Ketua Jurusan/Prodi

Dr. H. Supardin, M.H.I.  
NIP. 196503021994031003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Ismail, lahir pada tanggal Kung, 12 juli 1996. Anak ketiga dari tujuh bersaudara. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 63 Ajjalireng lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke tingkat MTS/SMP di pondok Pesantren As-Adiyah Putra II Sengkang Kabupaten Wajo lulus pada tahun 2011. Dan melanjutkan pendidikan pada tingkat Aliyah/SMA pada sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Dua Boccoe Kabupaten Bone lulus pada tahun 2014. Penulis melanjutkan jenjang pendidikannya ke UIN Alauddin Makassar pada tahun 2014 dengan mengambil prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syariah Dan Hukum. Pengalaman organisasi ekstra kampus yaitu Kepmi Bone dan juga Dpc Kepmi Bone Kecamatan Tellusiattinge Dan Anggota Komunitas Pusaka sampai sekarang.